

**HUBUNGAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI ORANGTUA DENGAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA MALANG TAHUN 2013**

Studi pada 5 Kecamatan Kota Malang

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Disusun oleh:
Muchammad Dzulfikar
NIM. 105030101111130**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

MOTTO

“Every problem is a gift, without problems we would not grow”

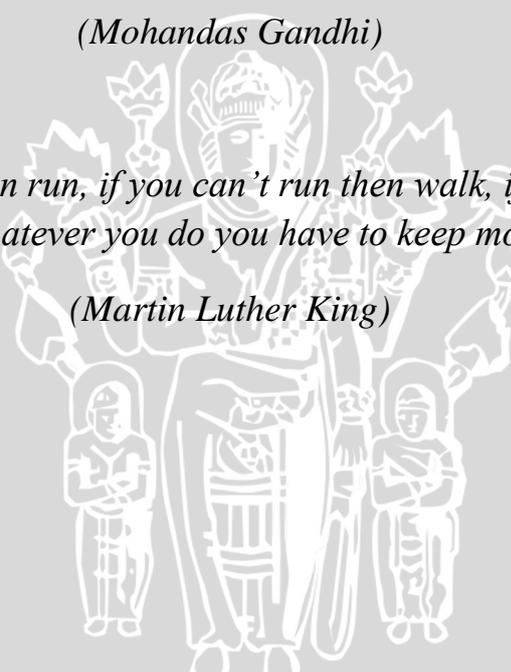
(Anthony Robbins)

“Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes”

(Mohandas Gandhi)

“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward”

(Martin Luther King)



TANDA PERSETUJUAN

Judul : Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang).

Disusun Oleh : Muchammad Dzulfikar

NIM : 105030101111130

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 20 Agustus 2014

Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,


Dr. Bambang Santoso Harvono, MS.
NIP. 19610204 198601 1 001


Drs. Siswidiyanto, MS.
NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 Agustus 2014



Muchammad Dzulfikar
NIM. 105030101111130

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 Agustus 2014
 Jam : 09:00 – 10:00
 Skripsi atas nama : Muchammad Dzulfikar
 Judul : Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang).

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Bambang Santoso Harvono, MS.
 NIP. 19610204 198601 1 001



Dr. Siswidiyanto, MS.
 NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota

Anggota



Dr. Irwan Noor, MA.
 NIP. 19611024 198601 1 002



Farida Nurani, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19700721 200501 2 001



RINGKASAN

Muchammad Dzulfikar, 2014. **Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang)**. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Drs. Siswidiyanto, MS.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut ideologi Pancasila, dan Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilih Pemula adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan terselenggaranya Pemilu. Dalam penelitian ini, Tingkat sosial ekonomi orangtua pemilih pemula menjadi fokus utama dalam upaya untuk mencari hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu Walikota Malang Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan prosedur pengumpulan data survei. Lokasi penelitian dilakukan di 5 Kecamatan di Kota Malang. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan nilai toleransi 10%, sehingga didapatkan 270 sampel dari 250.000 populasi pemilih pemula di 5 Kecamatan Kota Malang yang kemudia dibagi rata sebanyak 54 jiwa setiap Kecamatannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner. Uji yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi autokorelasi, heteroskedatisitas, dan normalitas, uji analisis korelasi meliputi korelasi sederhana, korelasi berganda dan korelasi parsial, uji analisis regresi meliputi regresi linier berganda dan koefisien determinasi, uji hipotesis meliputi uji simultan dan uji parsial. Hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan antara tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Walikota Malang tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang ada, pengujian secara simultan memberikan kesimpulan bahwa dari kedua variabel yang terdiri dari tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan) (X_1) dan tingkat tingkat sosial ekonomi orangtua (pendapatan) (X_2), berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Walikota Malang tahun 2013.

Dari uji Determinasi (R^2) diperoleh hasil sebesar 0,659 yang artinya 65,9% partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh variabel bebas yang diteliti, yaitu tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan) (X_1) dan tingkat tingkat sosial ekonomi orangtua (pendapatan) (X_2), sedangkan sisanya sebesar 34,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendidikan dan Pendapatan), Partisipasi Pemilih Pemula.

SUMMARY

Muchammad Dzulfikar, 2014. **Relationship of Parents Socioeconomic Levels With First-time Voters Participation On Malang Mayor Elections In 2013 (Studies in 5 Districts Malang)**. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Drs. Siswidiyanto, MS.

Indonesia is a democratic country that adheres to the ideology of Pancasila, and the Election is a democratic ways that means has been used in most countries in the world including Indonesia. Through elections allow all parties can be accommodated what they want and aspire to realize a better life. First-time voters is one of the factors that influence the success rate of implementation of the election. In this study, parental socioeconomic level of first-time voters into the primary focus in an effort to find a connection with the administration of elections Mayor of Malang in 2013.

This study uses quantitative research method for survey data collection procedures. Location of the study conducted in 5 Districts in Malang. Measurement scale used in this study is Guttman scale. Method of determining the number of samples in this experiment using the Isaac and Michael formula with 10% tolerance value, so we get 270 samples from a population of 250,000 first-time voters in the 5th District of Malang who were then divided equally by 54 people for each District. The data used in this study is primary data through questionnaires. The test used is the validity and reliability, the classic assumption test include autocorrelation, heteroskedasticity, and normality, correlation analysis test includes simple correlation, multiple correlation and partial correlation, regression test includes multiple linear regression and coefficient of determination, hypothesis testing including simultaneous test and the partial test. The hypothesis is the existence of a relationship between parental socioeconomic level with the participation of first-time voters on Malang Election Mayor in 2013.

Based on the research and discussion of existing data, based from simultaneously test the conclusion that of the two variables composed of parental socioeconomic status (education) (X_1) and the level of parental socioeconomic status (income) (X_2), significantly influence participation of first-time voters on Malang Election Mayor in 2013.

From determination test (R^2) obtained yield was 0.659, which means 65.9% voters participation is influenced by the independent variables studied, the level of parental socioeconomic (education) (X_1) and the level of parental socioeconomic status (income) (X_2), while the remaining 34.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Parents Socioeconomic (Education and Income), First-time Voters Participation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang).”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

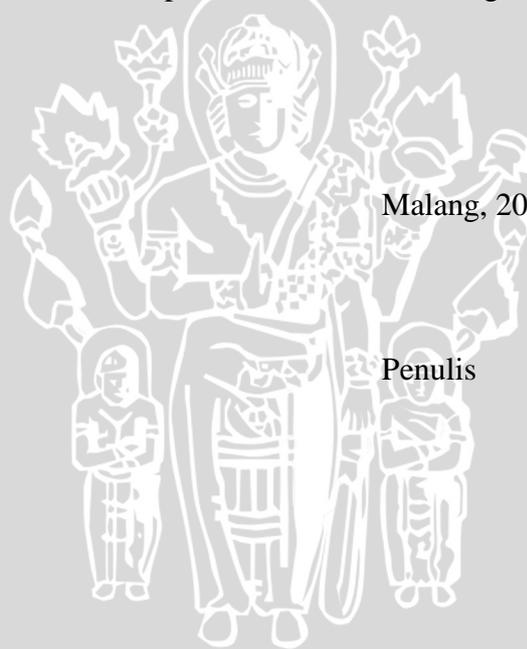
1. Orang tua tercinta Abdul Mu'in dan Rupiani yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi serta mendokan dalam keadaan suka dan duka.
2. Prof. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Drs. Siswidiyanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasehat selama penulisan skripsi.
6. Dr. Irwan Noor, MA dan Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan lebih lanjut dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

8. Segenap warga Kota Malang khususnya warga di lingkungan Kecamatan Lowokwaru, Sukun, Klojen, Kedungkandang dan Blimbing yang sangat membantu penulis dalam proses penelitian dan membantu untuk mendapatkan data.
9. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2010, kerabat-kerabat terdekat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu serta sanak famili yang saya sayangi, memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Agustus 2014

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Masalah Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Konsep Administrasi Publik	15
1. Pengertian Administrasi Publik	15
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	16
C. Konsep Politik	17
1. Pengertian Politik	17
2. Fungsi-Fungsi Politik dan Strukturnya	18
D. Konsep Partisipasi Politik	21
1. Pengertian Partisipasi Politik	21
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	24
3. Tujuan Partisipasi Politik	29
4. Landasan Partisipasi Politik	31



E. Konsep Desentralisasi.....	32
F. Konsep Pemilihan Umum.....	33
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	33
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	34
3. Pengertian dan Dasar-Dasar Pemilukada.....	35
G. Konsep Pemilih Pemula.....	38
H. Konsep Sosial Ekonomi.....	39
1. Pengertian Sosial Ekonomi.....	39
2. Pengertian Status Sosial.....	41
3. Macam-Macam Status Sosial.....	42
I. Analogi Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik.....	43
J. Hipotesis.....	45
1. Penetapan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a).....	45
a. Hipotesis Pertama.....	46
b. Hipotesis Kedua.....	46
c. Hipotesis Ketiga.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Metode Pengumpulan Data.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
1. Populasi.....	49
2. Sampel.....	50
D. Variabel Penelitian.....	51
E. Definisi Konsep dan Operasional Variabel.....	52
1. Definisi Konsep.....	52
2. Operasional Variabel.....	53
F. Validitas dan Reabilitas.....	55
1. Uji Validitas.....	55
2. Uji Reabilitas.....	56
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	56
H. Paradigma Penelitian.....	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Deskripsi Umum Lokasi Kota Malang.....	62
1.1. Sejarah Kota Malang.....	62



1.2. Keadaan Geografis	65
2. Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	65
2.1. Letak Geografis	65
2.2. Kependudukan	66
2.3. Sarana Umum	67
3. Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ..	68
3.1. Letak Geografis	68
3.2. Kependudukan	68
3.3. Sarana Umum	69
4. Gambaran Umum Kecamatan Sukun Kota Malang	69
4.1. Letak Geografis	69
4.2. Kependudukan	70
4.3. Sarana Umum	71
5. Gambaran Umum Kecamatan Klojen Kota Malang	71
5.1. Letak Geografis	71
5.2. Kependudukan	72
5.3. Sarana Umum	73
6. Gambaran Umum Kecamatan Blimbing Kota Malang	74
6.1. Letak Geografis	74
6.2. Kependudukan	74
6.3. Sarana Umum	75
B. Gambaran Umum Responden	76
C. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	77
a. Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan (X1)	78
b. Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan (X2)	79
c. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Politik Pemilih Pemula(Y)	81
D. Analisis Data	86
1. Korelasi Sederhana (<i>Product Moment</i>)	86
2. Korelasi Berganda	88
3. Korelasi Parsial	89
4. Uji Asumsi Klasik	91
a. Uji Asumsi Klasik Normalitas	91
b. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi	92
c. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas	93
5. Uji F (Uji Simultan)	93
6. Uji t (Uji Parsial)	93
7. Regresi Linier Berganda	95
8. Koefisien Determinasi	97
E. Pembahasan	97

1. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendidikan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula.....	98
2. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendapatan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula.....	98
3. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendidikan dan Pendapatan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	110



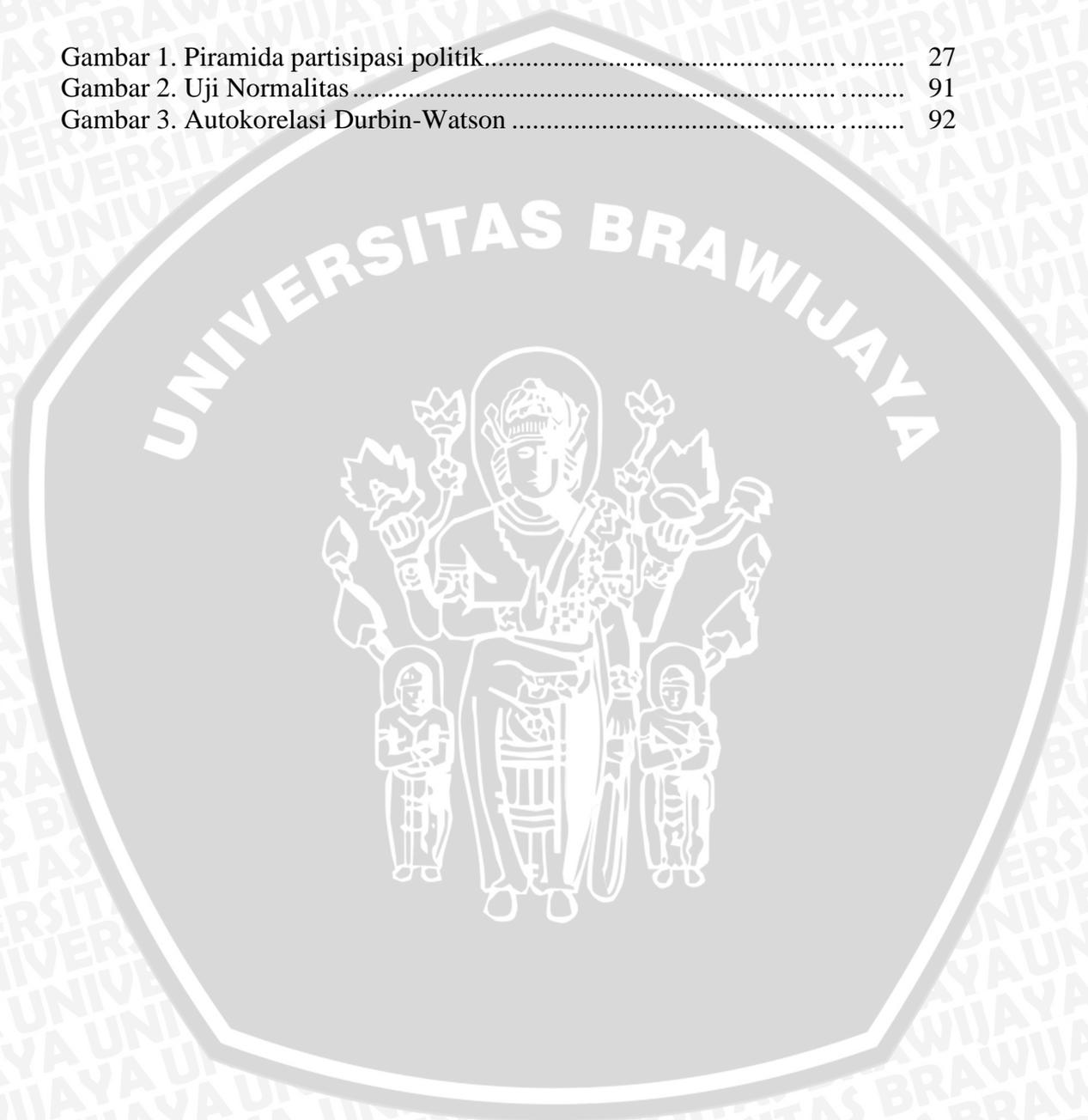
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Nasional.....	4
Tabel 2. DPT Pilwali Kota Malang Tahun 2013.....	8
Tabel 3. Bentuk-bentuk partisipasi politik.....	26
Tabel 4. Variabel Tingkat Pendidikan (X_1).....	53
Tabel 5. Variabel Tingkat Pendapatan (X_2).....	53
Tabel 6. Variabel Partisipasi Pemilih Pemula (Y).....	54
Tabel 7. Hasil Uji Validitas.....	55
Tabel 8. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 9. Gambaran Responden Berdasarkan Usia.....	76
Tabel 10. Gambaran Responden Berdasarkan Status Perkawinan.....	77
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan (X_1).....	78
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan (X_2).....	79
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Y).....	81
Tabel 14. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi (Pendidikan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013.....	86
Tabel 15. Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	86
Tabel 16. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi (Pendapatan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013.....	87
Tabel 17. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi (Pendidikan dan Pendapatan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013.....	88
Tabel 18. Hasil Uji Korelasi Parsial X_1 terhadap Y dengan X_2 Dikontrol.....	89
Tabel 19. Hasil Uji Korelasi Parsial X_2 terhadap Y dengan X_1 Dikontrol.....	90
Tabel 20. Perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel}	94
Tabel 21. Tabel 4.13. Tabel Regresi Linier Berganda.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida partisipasi politik.....	27
Gambar 2. Uji Normalitas	91
Gambar 3. Autokorelasi Durbin-Watson	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana pendefinisian Administrasi Publik yang ditulis oleh Syafiie (2006:23). Banyak para ahli yang memberikan definisi pada Administrasi Publik di antaranya sebagai berikut:

Menurut Pfiffner dan Presthus, Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Untuk memosisikan Ilmu Administrasi Publik dengan kajian yang akan dibahas dalam ilmu-ilmu sosial, maka haruslah terlebih dahulu dicari benang-merahnya sehingga akan lebih nampak pokok permasalahan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, peneliti ingin membahas mengenai partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum maka posisi latar belakang untuk mengawali penelitian ini adalah mengenai hubungan antara administrasi publik dengan partisipasi politik. Sebagaimana menurut Syafiie (2006:27) bahwa Sebagitu luasnya ruang lingkup Administrasi Publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materialnya negara, yaitu antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara sendiri, serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.

Pertama-tama perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut ideologi Pancasila, dan pada era reformasi ini Indonesia adalah negara yang menganut sistem desentralisasi yang apabila dilihat dari sudut administrasi publik. desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan/kewenangan yang dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja.

Dalam konteks Indonesia, format desentralisasi telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi tentang pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dan otonomi yang terbatas kepada Propinsi. Dengan adanya pendelegasian wewenang ini maka lahirlah konsep Pemilukada yang diamanatkan oleh UUD 1945 amandemen (4) dan tertera dalam UU no. 32 Tahun 2004.

Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang *notabene* memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Di Indonesia, berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Damsar (2010:178) mengemukakan bahwa;

Partisipasi dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang berdimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peranserta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilihan umum (legislatif, presiden, kepala daerah, dan kepala desa) di Indonesia, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya ini dimengerti sebagai partisipasi.

Jeffrey M. Paige dalam Surbakti (2007:144) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang;

Pertama adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Dan pada akhirnya, kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan fakta terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Nasional

Tahun	Pemilih Terdaftar (jiwa)	Menggunakan Hak (%)	Tidak Menggunakan Hak (%)	Suara Sah (%)	Suara Tidak Sah (%)
1971	58.558.776	96,62	3,38	96,59	3,41
1977	69.871.092	96,52	3,48	94,90	5,10
1982	82.134.195	96,47	3,53	93,71	6,29
1987	93.737.633	96,43	3,57	95,00	5,00
1992	107.565.413	95,06	4,94	95,67	4,33
1997	125.640.987	93,55	6,45	96,13	3,87
1999	118.158.778	92,74	7,26	96,61	3,39
2004*	148.000.369	84,07	15,93	91,19	8,81
2004**	155.048.803	78,23	21,77	97,83	2,17
2004***	152.246.188	76,63	23,37	97,94	2,06
2009	176.411.434	72,54	27,46	94,93	5,07

Sumber: Media Center KPU tahun 2010

Keterangan

- * : Legislatif
- ** : Pilpres putaran I
- *** : Pilpres putaran II

Dari tabel 1, selama periode Orde Baru tingkat partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu di atas 90%. Partisipasi politik di bawah rezim pemerintahan Soeharto dinilai semu, sejumlah faktor yang menggiring pada persepsi ini adalah represi politik dan model mobilisasi yang sangat kuat selama enam periode pemilu sepanjang 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Partisipasi Pemilu pada era Orde Baru memang memiliki kecenderungan turun dalam setiap penyelenggaraan, tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada penyelenggaraan pemilu pertama di era reformasi, antusiasme pemilih masih tinggi, tercatat lebih dari 92,74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan dengan sistem langsung untuk pertama kali pada tahun 2004, tingkat partisipasi merosot drastis, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih melonjak sampai 15,93%, kemudian pada pilpres putaran pertama, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21,77% jumlah tersebut kembali melonjak menjadi 23,37% pada pilpres putaran kedua. Pemilu Presiden tahun 2009 angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan di bandingkan pemilu yang dilakukan sebelumnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Pemilu Presiden tahun 2009 angka partisipasi politik masyarakat secara nasional tercatat 72,54% (KPU).

Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, penulis mensinyalir bahwa peran dari pemilih pemula sangat mendominasi mengingat pemilih pemula yang baru masuk usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Selain itu, ketidaktahuan dalam soal politik praktis, membuat pemilih

pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 tahun 2008, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengamalan voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti tidak mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik

termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan dan sistem pemerintahan Indonesia ke depan.

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilu legislatif merupakan kegiatan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Dalam upaya itu, mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalamannya dalam dunia politik.

Terkait dengan beberapa penjelasan di atas, penyelenggaraan Pemilu Walikota Kota Malang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali secara serentak seperti halnya dengan kota-kota lain sesuai undang-undang yang bertujuan untuk mensukseskan demokrasi di negeri ini.

Berikut merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pilwali Kota Malang Tahun 2013.

Tabel 2. DPT Pilwali Kota Malang Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Total	Jumlah Pemilih Pemula
Blimbing	327	132.248	Sekitar 40% dari total DPT (242.691)
Kedungkandang	333	137.181	
Klojen	208	80.945	
Lowokwaru	300	117.048	
Sukun	344	139.306	

Sumber: KPUD Kota Malang

Dari data di tabel 2, peneliti menetapkan studi penelitiannya di 5 Kecamatan di Kota Malang. Terkait dengan penelitian yang mengambil objek pemilih pemula adalah karena dalam 15 tahun terakhir atau 3 kali periode Pemilihan Walikota Kota Malang, dengan penggolongan usia mulai 17-90 tahun dalam DPT untuk pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun tumbuh sekitar 9,7% dari DPT periode sebelumnya. (KPUD Kota Malang).

Dengan adanya pemilih pemula yang berkembang secara signifikan setiap 5 tahunnya, penulis ingin meneliti tentang peran tingkat sosial ekonomi orangtua terhadap partisipasi pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun.

Karena menurut Budiarto (1998:47) bahwa;

Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial). Di banyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik dan dengan pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Juga di banyak negara, lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik anak-anak didiknya. Hal ini terjadi di semua negara, baik yang komunis, otoriter maupun yang demokratis.

Menurut Mas'ood (2008:61), disamping pendidikan dan perbedaan jenis kelamin, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada

wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

Sementara itu menurut Huntington, 1994:58;

Hipotesis pembangunan menyatakan bahwa tingkat pembangunan sosial ekonomi yang lebih tinggi dalam masyarakat akan mengakibatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan suatu pergeseran dari bentuk partisipasi yang dimobilisasikan ke partisipasi yang otonom. Sementara itu, hipotesis pemerataan menyatakan bahwa tingkat pemerataan sosial ekonomi yang lebih tinggi mengakibatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi.

Pembangunan pada dasarnya dapat mendorong partisipasi politik. Hal ini seperti yang dijelaskan Samuel Huntington dan Joan Nelson (1994:60) bahwa didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi cenderung bervariasi dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih berpartisipasi daripada mereka yang miskin, tidak berpendidikan dan memiliki pekerjaan berstatus rendah.

Untuk mengetahui hubungan tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilwali Kota Malang Tahun 2013 maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, adapun penelitian akan dilaksanakan di 5 Kecamatan Kota Malang. Dan dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat sosial ekonomi orang tua di 5 Kecamatan Kota Malang?
- b. Bagaimana bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013?
- c. Bagaimana hubungan antara tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi orang tua di 5 Kecamatan Kota Malang.
- b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat sosial ekonomi orang tua dengan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013.

D. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mencakup tentang gambaran umum 5 kecamatan di kota malang (Lowokwaru, Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Sukun), hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang tahun 2013 beserta analisis korelasinya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.
- b. Bagi civitas akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013.

b. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik

Agar mereka lebih meningkatkan peran serta pemilih pemula pada kegiatan partai politik, khususnya dalam kegiatan Pemilu pada masa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi (Jurusan Ilmu Administrasi Publik)

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

d. Bagi masyarakat

Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik terhadap Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Politik dan menambah pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik terhadap pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi menjelaskan penelitian terdahulu serta teori-teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang analisis data penelitian, dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari interpretasi hasil analisis data penelitian dengan saran-saran yang dipandang perlu untuk diberikan.



BAB II

KAJIAN PUSATAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marlini Tarigan (2009)	Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008.	Pemilih di Kabupaten Temanggung	Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa dari keempat variabel yaitu partisipasi politik (Y), popularitas calon (X1), status sosial ekonomi (X2) dan kondisi sosial politik (X3), variabel popularitas calon dan variabel kondisi sosial politik menunjukkan adanya korelasi dengan partisipasi politik. Sedangkan variable status sosial ekonomi menunjukkan tidak ada hubungan positif terhadap partisipasi politik. Sedangkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hanya popularitas calon yang mempunyai hubungan positif dengan partisipasi politik, sedangkan variabel status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik mempunyai hubungan negative dengan partisipasi politik.

B. Konsep Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Dalam kaitannya peneliti membahas partisipasi pemilih pemula, alangkah baiknya jika peneliti juga memaparkan teori dan konsepsi terkait poros ilmu yang menjadi induk keilmuan yang ditekuni. Demikian akan dijelaskan beberapa pengertian administrasi publik oleh beberapa ahli yang dikutip dari Syafiie (2006:24-26), antara lain:

- a. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro:
 1. (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
 2. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
 3. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
 4. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
 5. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
- b. Menurut Dwight Waldo
Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
- b. Menurut George J. Gordon
Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Pasolong (2008:8) mendefinikan “administrasi publik sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan administrasi publik adalah proses kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Secara garis besar ruang lingkup administrasi publik merupakan topik-topik yang dibahas dari perkembangan ilmu administrasi publik. Beberapa pendapat mengenai ruang lingkup administrasi publik dikemukakan oleh Nicholas Henry dalam Pasolong (2008:19) yaitu:

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia,
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Keban dalam Pasolong (2008:21) juga menyebutkan ruang lingkup lingkup administratif publik meliputi “kebijakan, organisasi, manajemen, moral dan etika, lingkungan dan akuntabilitas.”

Selanjutnya ruang lingkup menurut Pasolong (2008:21) meliputi “kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik.”

C. Konsep Politik

1. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judging wisely, well-judged prudent*. Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang bermakana *relating to a citizen*. Kata itu berasal juga dari kata *polis* yang searti dengan *city*: kota. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yang menurut Poerwadarminta (1983:763) dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, yaitu “Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.”

Dalam istilah, kata politik, pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang dikenal juga dengan *Republik*. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Sebab, yang dibahas dalam kedua buku itu merupakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dapat dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Karenanya dari konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti: yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hokum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang

hendak dicapai. Unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dari berbagai pengertian dan maksud kata politik, sekalipun di kalangan para ilmuwan politik tidak ada kesepakatan.

Dan dari sekian definisi yang ada menurut Isaak, (1988:67):

Paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengkaitkan politik dengan negate, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengkaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik. Perbedaan pandangan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan; yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Pendekatan tradisional meliputi beberapa aspek; misalnya pendekatan historis yang menekankan bahasanya pada perkembangan partai-partai politik, perkembangan hubungan politik dengan luar negeri, dan perkembangan-perkembangan ide-ide politik yang besar. Pendekatan legalistik yang menekankan bahasanya pada masalah-masalah institusi politik seperti lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif. Sedangkan pendekatan perilaku menekankan perhatiannya pada perilaku aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting dalam politik.

Dan dapat disimpulkan bahwa hakikat mengenai politik adalah kegiatan yang terdapat pada sekitar institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik seperti tokoh-tokoh pemerintahan dan wakil-wakil rakyat.

2. Fungsi-Fungsi Politik dan Strukturnya.

Berkaitan dengan aktivitas politik di atas, Almond & Coleman, (1970:97) telah mengungkapkan kegiatan-kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik dalam dua kategori fungsi-fungsi masukan (*input functions*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output functions*). Yang pertama merupakan fungsi yang sangat penting dan menentukan cara kerja sistem dan yang diperlukan untuk membuat serta melaksanakan kebijakan dalam sistem politik.

Fungsi-fungsi politik yang dimaksud adalah:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Dalam hal ini ia harus mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranannya dalam kelompok itu. Dari arti ini maka sosialisasi politik merupakan proses sosial yang menjadikan seorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Sosialisasi politik dilaksanakan oleh berbagai unsur dalam masyarakat, misalnya: keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, juga oleh instansi resmi. Dengan begitu kebudayaan politik dapat berkembang dan terpelihara dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Almond juga melihat fungsi lain dari sosialisasi politik. Ia bukan hanya memelihara, tetapi sebaliknya, sosialisasi politik dapat mengakibatkan perubahan budaya politik bahkan menciptakan yang baru. Dua fungsi terakhir ini tidak lagi relevan dengan konsep sosialisasi sebab tujuan utama sosialisasi tidak terdapat di dalamnya, justru yang ada adalah konversi budaya politik.

b. Rekrutmen Politik

Yang dimaksud adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Menurut Almond, setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut warganya untuk menduduki posisi politik dan administrasi. Dalam sistem politik barat, rekrutmen dipengaruhi oleh kriteria kemampuan alami dan prestasi serta terbuka oleh semua warga masyarakat; sebaliknya dalam sistem tradisional kedua kriteria tersebut dikenal pula, hanya prestasi kurang berpengaruh karena seorang pemimpin diangkat berdasarkan keutamaannya dalam silsilah keturunan. Kriteria umum, yakni usia dan jenis kelamin juga menjadi pertimbangan disini.

c. Artikulasi Kepentingan

Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik atau pemerintah melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang juga memiliki kepentingan yang sama, atau seperti dalam sistem politik tradisional, kadang-kadang rakyat secara langsung menyatakan keinginannya kepada pejabat pemerintah.

d. Agregasi Kepentingan

Agregat di sini adalah salah satu fungsi dalam politik. Yang dimaksud adalah proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan, atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu. Lebih lanjut Almond mengatakan bahwa fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi politik dapat tumpang tindih. Agregasi kepentingan mengandung makna tingkat yang lebih inklusif berkenaan dengan proses penggabungan kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh sub-sistem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi,

partai-partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. Meskipun begitu, peranan utama diberikan kepada partai-partai seperti terlihat dalam uraian Almond.

e. Komunikasi Politik

Menurut Gabriel A. Almond & James S. Coleman dalam *The Politics of The Developing Areas* (1970:38-44). Komunikasi politik, sebagai satu fungsi politik merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi politik yang lain. Orang tua, guru-guru, dan pemimpin-pemimpin agama mislanya mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi. Wakil-wakil rakyat, partai-partai politik menyelenggarakan artikulasi dan agregasi politik dengan jalan menghubungkan tuntutan-tuntutan dan rekomendasi-rekomendasi kebijaksanaan. Pembuat undang-undang membuat hukum berdasarkan informasi yang dikomunikasikan kepada mereka dan komunikasi antar sesama mereka. Juga birokrasi menyelenggarakan tugas-tugas mereka dengan menerima dan menganalisis informasi dari masyarakat dan dari berbagai bagian dari negara. Dan akhirnya proses penghakiman diselenggarakan pula dengan perantara komunikasi.

Sebagai bagian dari fungsi politik adalah fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan ini telah ditemukan antara lain dalam karya Aristoteles. Ia menyatakan:

“All constitution have three elements, cocerning which the good law-giver has to regard what is expedient for each contitution. When they are well-ordered, the constitution is well ordere andasa they differ from one another, constitution differ. There is (1) one element which delibera-tes about public affairs; Secondly (2) that cocerned with the magistracies the question being, what they should be, over what they should exercise authority, and what should be the mode of electing them; and thirdly (3) that which has judicial power.”

Kutipan di atas dengan tegas menyatakan adanya tiga fungsi pemerintahan, yaitu: “fungsi pembahasan, administrasi dan pengadilan”. Fungsi pertama relevan dengan fungsi legislatif yang dikenal dalam sistem kenegaraan modern sekarang. Sekalipun keduanya tidak dapat diidentikkan karena fungsi pembahasan tidak hanya mencakup kekuasaan pembuatan dan pengesahan hukum, kekuasaan menyatakan perang dan damai, membuat perjanjian dengan negara lain, tetapi juga menjatuhkan hukuman seperti pidana mati, pengasingan

dan penyitaan, yang kini merupakan bagian dari kekuasaan yudicial. Sedangkan fungsi administrasi yang erat kaitannya dengan fungsi eksekutif yang berkenaan dengan penyelenggaraan jabatan-jabatan pemerintahan seperti pengawasan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan dan anak-anak, penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat, serta jabatan-jabatan kepemimpinan.

Demikian sekadar uraian tentang fungsi-fungsi politik yang tentunya dapat dikembangkan lagi dengan studi yang lebih *intens*. Akan tetapi bila ditarik yang lebih mendasar bahwa fungsi-fungsi itu tetap akan terakumulasi ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi-fungsi keluaran, atau dikenal dengan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan. Untuk yang lainnya, yang dapat disebut lembaga sosial politik mewakili dan mencerminkan kepentingan-keentingan politik yang hidup di masyarakat. Lembaga ini biasanya hanya berfungsi sebagai fungsi masukan.

D. Konsep Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Menurut Budiarto (1981:1-27):

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public*

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Di bawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana:

1. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*:
“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (*The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).
2. Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*:
“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan /atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*). Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” (*the authoritative allocation of values for a society*).
3. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*: “Partisipasi politik adalah kegiatan

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif'. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit-banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficiency*.

Dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat

partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Maka dari itu pembatasan-pembatasan yang di masa lalu sering diadakan, seperti pembayaran pajak pemilihan (yang di Amerika Serikat pada masa itu merupakan suatu tindakan efektif untuk membatasi partisipasi orang kulit hitam), atau pemilihan hanya oleh kaum pria saja (wanita Swiss baru mulai tahun 1972 diberi hak pilih) dewasa ini umumnya telah dihilangkan.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa, jika kurang banyak pendapat dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Termasuk dalam kelompok ini sarjana-sarjana seperti Herbert Mc Closky, Gabriel Almond, Norman H. Nie dan Sidney Verba.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Maran, (2001:148):

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk

memilih kepala negara. Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat ukmum, demonstrasi, dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Sastroatmodjo (1995:77) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman, 2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007:287):

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Syarbaini, 2002:70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

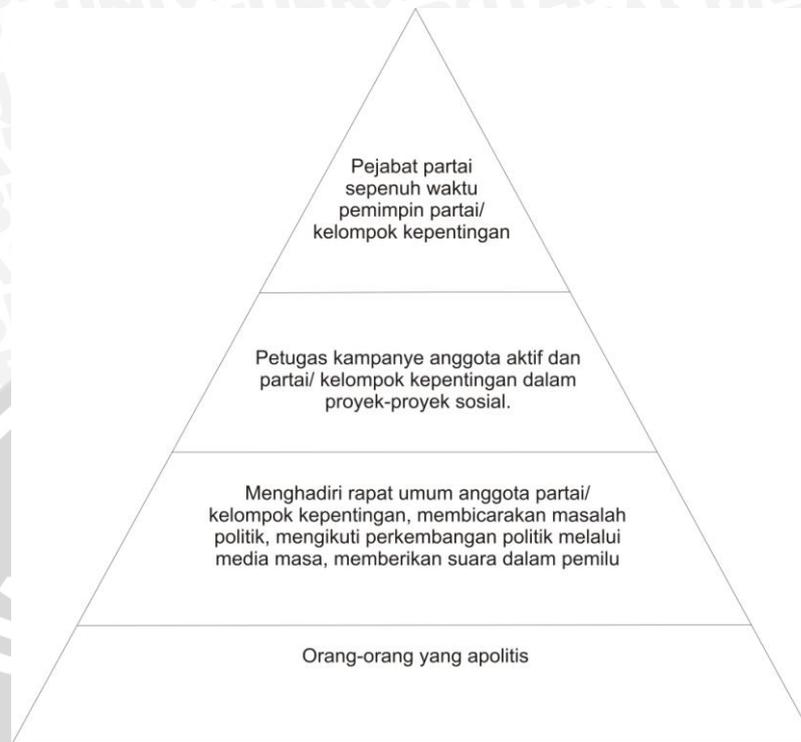
Tabel 3. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber: Almond dalam Syarbaini, (2002:71)

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson (Suryadi, 2007:137):

Menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama "Piramida Partisipasi Politik". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.



Gambar 1. Piramida partisipasi politik

Sumber: Roth dan Wilson dalam Syarbani, (2002:69)

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis (Syarbani, 2002:70). Kelompok yang berada diatas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak diatas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan. Kelompok terakhir yang terletak

dibagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis, warga yang termasuk kelompok aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok aktivis terdiri dari pejabat partai sepenuh waktu, dan pemimpin partai/kelompok kepentingan.

Partisipasi seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998:47). Dalam konteks ini teori partisipasi masyarakat pemilih pemula diarahkan pada berbagai bentuk dan jenis peran serta dan keikutsertaan masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum pada pemilu tahun 2009.

Di banyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik mungkin pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Juga di banyak negara, lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik anak-anak didiknya. Hal ini terjadi di semua negara, baik yang komunis, otoriter maupun yang demokratis.

Di samping pendidikan dan perbedaan jenis kelamin, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah (Mohtar Mas' oed, 2008:61).

3. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Waimier (Sastroatmodjo, 1995:85) menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:

- a. Modernisasi di segala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa, dan sebagainya.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas baru menengah itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperbutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers.

Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.

- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Davis (Sastroatmodjo, 1995:85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekanya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, menurut Sastroatmodjo, (1995:85). Partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

4. Landasan Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994:21) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

- a. Kelas: Perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok/komunal: Perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- c. Partai: Perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- d. Golongan (Function): Perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hermawan (2001:72) berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah:

- a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman, agama, kelas dan sebagainya.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman dan lain-lain.

E. Konsep Desentralisasi

Dengan adanya penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang prinsip mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara legal pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan sarana yang lebih luas dan kuat bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah beberapa pengertian desentralisasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Ryaas Rasyid seperti yang dikutip oleh Yudhoyono (2001:20):

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Melalui pelimpahan wewenang itulah Pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah), administrasi negara atau kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta.

Menurut Joseph Riwo Kaho dalam Bambang Yudhoyono (2001:21), berikut merupakan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi:

1. Dilihat dari sudut politik, sebagai permainan kekuasaan (*game theory*), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

F. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbani, 2002:80).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas

bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994:329).

Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut system permusyawaratan perwakilan.

Dengan demikian Pemilihan Umum merupakan suatu sarana pengembangan demokrasi sekalipun bukan satu-satunya sarana, fungsinya adalah sebagai alat untuk menyetatkan demokrasi dan bukan merupakan tujuan demokrasi itu sendiri, sehingga Pemilihan Umum belum tentu secara otomatis membuat demokrasi itu sehat dan sempurna

Disamping Pemilihan Umum, kehidupan demokrasi yang sehat memerlukan syarat lain. Diantara syarat-syarat ini yang terpenting adalah kesadaran dan tanggung jawab setiap warga Negara untuk betul-betul menghayati, melaksanakan dan mengembangkan azas-azas yang tersurat dan tersirat dalam tata krama dan etika demokrasi.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22

E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 22 tahun 2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari.

3. Pengertian dan Dasar-Dasar Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Cara demokratis tersebut diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat sebagai pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang akan memimpin daerahnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

- 1) Aspek Normatif
 - a. Penyelenggaraan Pemilukada merupakan amanat UUD 1945 dan UU no.

32 Tahun 2004

- b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan Gubernur, Bupati/Walikota dipilih secara demokratis.
- c. Kemudian ditindaklanjuti dengan UU no. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas luber dan jurdil.

2) Aspek Administratif

- a. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada hubungan kewilayahan, yakni daerah otonom dengan otonominya diselenggarakan dalam wilayah NKRI.
- b. Ada hubungan administratif dan manajemen, yaitu tanggung jawab penyelenggara urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

3) Aspek Kebangsaan dan Kenegaraan

- a. Pemilukada sebagai bagian dari demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan merupakan bagian dari upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dinamika politik dalam negeri yang berlandaskan semangat reformasi.
- b. Otonomi Daerah itu ada setelah adanya negara bangsa, yang disebut NKRI.
- c. Secara historis, terbentuknya negara bangsa memberikan nilai persatuan bangsa sebagai tatanan nilai yang paling utama. Terbentuknya negara bangsa, didahului dengan semangat persatuan untuk berada dalam satu

bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Hakekat pelaksanaan demokrasi sebagai upaya untuk mengisi kedaulatan bangsa harus tetap dalam koridor menjaga persatuan bangsa.

4) Aspek Nilai Persatuan dan Kesatuan Negara

- a. Nilai persatuan bangsa harus dijunjung tinggi.
- b. Nilai kedaulatan sebagai bangsa untuk mengurus dirinya secara demokratis perlu dilaksanakan dengan mengingat etika berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai keharmonisan antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah terus dijaga dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilukada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada merupakan rekrutmen politik, yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh-tokoh lokal yang mencalonkan sebagai Kepala Daerah.

Dalam kehidupan politik di daerah, Pemilukada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti bahwa kepala daerah dan DPRD setara dan menjadi mitra. Pemilukada sebagaimana di daerah sekaligus merupakan bagian dari rangkaian upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dinamika politik dalam negeri sebagai perwujudan semangat reformasi.

Menurut Ahmad Imron Rozuli, (2010:11). Pemilukada sebagai bagian dari proses demokrasi, yang mana dengan melalui serangkaian kegiatan yang

dilakukan akan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan tersebut, keterlibatan multi-stakeholder, partisipasi masyarakat serta kinerja lembaga-lembaga penyelenggara.

G. Konsep Pemilih Pemula

Menurut Ahmad Imron Rozuli, (2010:95). Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu Legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

- a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
- c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2013.

H. Konsep Sosial Ekonomi

1. Pengertian Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI, 1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum.

Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI, 1996:251).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981:35).

2. Pengertian Status Sosial

Terkait dengan keinginan meneliti tentang adanya hubungan antara kondisi ekonomi sosial orang tua/keluarga, maka perlu diketahui tentang pengertian status sosial yang menurut Raharjo, 2009:

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, seorang pejabat tentunya memiliki ruang lingkup interaksi yang lebih luas dan bervariasi bila dibandingkan dengan seorang petani. Pejabat akan berinteraksi dengan banyak orang dan dari berbagai status dan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari masyarakat biasa, pengusaha, politikus, teknokrat, akademis, dan sebagainya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Lain halnya dengan petani, dalam kesehariannya ia hanya berinteraksi dengan sedikit orang yang status dan latar belakangnya juga tidak jauh berbeda dengan dirinya.

3. Macam-Macam Status Sosial

Dengan adanya pengertian dasar mengenai status sosial di atas, terdapat pembagian macam-macam status sosial yang menurut Puji Raharjo, 2009 yaitu:

a. *Ascribed status*

Ascribed status, yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan. Status yang diperoleh memungkinkan orang untuk bersikap pasif. Seseorang dapat memiliki status ini tanpa harus berjuang ataupun melakukan usaha apa pun. Contohnya anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang diwariskan dan yang dimiliki oleh orang tuanya.

b. *Achieved status*

Achieved status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Untuk memperoleh status ini harus melalui perjuangan yang panjang dengan memerlukan pengorbanan dan lebih bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Hampir semua status yang dimiliki oleh seseorang di masyarakat harus diperjuangkan terlebih dahulu dalam meraihnya. Contohnya untuk menjadi sarjana harus melalui perjuangan terlebih dahulu. Seorang sarjana akan berjuang dengan keras untuk memperoleh gelar akademisnya. Tingkatan pendidikan dalam masa yang panjang harus dilalui untuk mencapainya yang juga memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya.

c. *Assigned status*

Assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Pada dasarnya status yang diperoleh adalah akibat dari status yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Contohnya seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa perjuangannya. Untuk menjadi seorang yang disebut pahlawan tentu ia harus berjuang mencapai statusnya dengan semua pengorbanan, baik jiwa maupun raga.

Pada masyarakat terdapat jenjang (stratifikasi sosial) yang merupakan penggolongan seseorang sesuai dengan status sosialnya. Penggolongan tersebut apabila didasari oleh kriteria ekonomi disebut kelas sosial. Kelas sosial ini terbagi atas kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Pada umumnya istilah kelas sosial lebih menunjukkan pada kelompok kelas sosial atas. Mereka merupakan golongan orang-orang yang kaya dan bergengsi. Mereka bangga dengan status sosial yang disandangnya. Semakin tinggi kelas sosialnya, maka akan semakin tinggi pula prestise (gengsi) yang dimilikinya. Oleh karena itu, mereka membentuk ciri tertentu agar tampak berbeda dengan kelas sosial yang lain. Ciri-ciri tersebut merupakan kebanggaan bagi pemiliknya. Ciri-ciri atau tanda tertentu yang dapat menunjukkan kelas sosial disebut simbol status.

Menurut Puji Raharjo, 2009. Beberapa simbol status masyarakat kelas atas, yaitu:

a. Tempat tinggal

Kelas sosial atas biasanya tinggal di perumahan elite yang mewah dan memiliki prestise tinggi. Orang yang tinggal di perumahan mewah menunjukkan bahwa ia adalah kelompok orang kaya. Perumahan yang mewah dengan semua fasilitasnya akan memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. Dengan melihat tempat tinggalnya, orang sudah dapat menilai kelas sosial seseorang.

b. Kekayaan

Kekayaan menjadi unsur utama yang sering ditonjolkan seperti mobil mewah, perhiasan, dan sebagainya. Kekayaan menjadi bagian terpenting dalam kelompok sosial karena dianggap sebagai simbol kesuksesan. Mobil mewah seperti merk jaguar sangat langka di Indonesia karena harganya yang mahal dan jumlahnya yang terbatas. Mobil ini memberi kebanggaan tersendiri bagi orang yang memiliki dan memakainya.

c. Penghasilan

Pada umumnya kelas sosial atas memiliki penghasilan yang tinggi. Mereka pada umumnya para eksekutif yang bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu dan menjadi orang yang sukses. Ada hubungan yang erat antara penghasilan dengan jenis pekerjaan. Kelompok sosial atas mempunyai pekerjaan yang elite dengan penghasilan yang tinggi.

d. Pakaian

Pakaian yang digunakan oleh kelompok sosial atas adalah pakaian yang bagus dan mahal. Mereka bangga mengenakan pakaian produksi luar negeri seperti baju buatan Italia, parfum dari Prancis, dan sebagainya.

e. Kegemaran

Kegemaran atau hobi kelompok sosial atas adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya yang besar, seperti shopping ke luar negeri, olahraga golf, dan sebagainya. Setiap orang mempunyai jenis kegemaran tertentu. Ada kegiatan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang umum, tetapi juga menjadi status simbol kelas sosial atas, misalnya memancing. Memancing merupakan kegemaran dari setiap orang tanpa batas kelas sosial. Tetapi memancing menjadi hobby elit ketika dilakukan oleh golongan kelas sosial atas. Mereka memancing Blue Marlyn di laut lepas dengan menggunakan kapal pesiar mewah.

I. Analogi Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik

Sebagaimana yang telah menjadi pokok bahasan peneliti yang ingin membahas tentang keterkaitan atau hubungan antara kondisi ekonomi sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula maka berikut ini adalah penjelasan

tentang letak hubungan kondisi ekonomi sosial terhadap partisipasi politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Frank Lindenfeld dalam Marlini (2009:42) bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ditemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa terasingkan dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.

Ungkapan senada juga yang diberikan oleh Robert Lane dalam Marlini (2009:44) yang dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi antara lain:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi.
2. Sebagai sarana memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu dalam studinya yang ingin mengetahui hubungan antara kondisi ekonomi sosial terhadap partisipasi politik masyarakat. Seperti halnya penelitian yang ditemukan oleh Marlini (2009:46) bahwa:

Individu yang mempunyai tingkat pendidikan pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergensi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Beberapa studi juga menemukan bahwa masing masing komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independen yang mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda. Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik. Dua individu

yang mempunyai tingkat pendapatan sama memiliki tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda.

Dengan adanya berbagai pendapat yang telah digunakan para ahli diatas. Peneliti telah memiliki dasar untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pembuktian teori mengenai adanya hubungan antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap partisipasi pemilih pemula. Terkait mengenai ukuran status sosial ekonomi, peneliti memilih variabel tingkat pendidikan dan jumlah pendapatan orang tua sebagai indeks ukurnya.

I. Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau mengolah hipotesis (Hasan, 2006:34). Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif menurut Sugiyono (2013:103) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

1. Penetapan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan (X_1) dan pekerjaan orang tua (X_2) terhadap partisipasi politik pemilih pemula (Y) pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013. Hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh yang signifikan yang pada umumnya

diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatifnya (H_a) adalah hipotesis penelitian.

Perumusan H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama

H_0 : Tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 baik secara parsial maupun simultan.

H_a : Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 baik secara parsial maupun simultan.

b. Hipotesis kedua

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013

H_a : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013

c. Hipotesis ketiga

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pekerjaan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pekerjaan orang tua terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tentang “Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013”, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dan prosedur pengumpulan data survei.

Penelitian Kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Laporan akhir untuk penelitian ini umumnya memiliki struktur yang ketat dan konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan pembahasan (Creswell, 2008).

Penelitian dengan menggunakan kuantitatif ini adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menurut Sulisty-Basuki (2006:147) meliputi:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang diberikan (Sulistyo-Basuki, 2006:110).

Pertanyaan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan dan menjawab dengan memilih dari sejumlah alternative. Keuntungan bentuk tertutup ialah mudah diselesaikan, mudah dianalisis, dan mampu memberikan jangkauan jawaban.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai laporan, dokumen dan data-data yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi data-data terlampir

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Bungin (2002:101) menjelaskan bahwa populasi merupakan obyek keseluruhan (universum) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber penelitian.

Sugiyono (2001:55) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki objek atau subjek itu.

Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah jumlah pemilih pemula 5 Kecamatan Kota Malang yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali Kota Malang tahun 2013. Dan data tersebut diambil di KPUD Kota Malang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007:81), sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun di 5 Kecamatan Kota Malang (Lowokwaru, Sukun, Blimbing, Klojen, Kedungkandang). Mengenai hal tersebut, peneliti menggunakan teknik *cluster sampling* dan penentuan jumlah sampelnya menggunakan metode yang dikembangkan oleh *Isaac* dan *Michael* dalam Sugiyono (2013:126) yakni sebagai berikut.

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan:

λ^2 = Dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%.

N = Jumlah Populasi

P = Q = 0,5

d = 0,05

s = Jumlah sampel

Dengan adanya populasi penelitian ini yaitu pemilih pemula yang sebanyak 242.691 jiwa dan merujuk terhadap tabel *Isaac* dan *Michael* dalam Sugiyono (2013:128). Jumlah populasi tersebut dibulatkan menjadi 250.000 jiwa, dan peneliti menggunakan taraf kesalahan sebesar 10% maka didapatkan perhitungan sampel sebesar 270 jiwa. Dari sampel tersebut, peneliti yang menggunakan sistem *cluster sampling* membagi rata terhadap 5 Kecamatan di Kota Malang yaitu Lowokwaru, Blimbing, Sukun, Kedungkandang, dan Klojen sehingga setiap Kecamatannya mendapat jatah sampel sebesar 54 jiwa.

D. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Bebas/ *Independent Variable* (X) dalam penelitian ini adalah Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga yang dibagi menjadi 2 variabel turunan/ indikator variabel yaitu:

- a. X_1 = Tingkat Pendidikan

Penggolongan pada tingkat pendidikan ini adalah SD, SMP, SMA, Sarjana.

b. X_2 = Tingkat Pendapatan

Penggolongan pada jumlah pendapatan dibagi menjadi 4 tingkat yaitu:

1. > Rp. 3.000.000,-
2. \geq Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-
3. \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-
4. < Rp. 1.000.000,-

2. Variabel Terikat/ *Dependent Variable* (Y) dalam penelitian ini adalah Partisipasi Pemilih Pemula. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Keikutsertaan Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013.

E. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

1. Definisi Konsep

Definisi konsep dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosial ekonomi orangtua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Terkait dengan penelitian ini, peneliti hanya menggunakan variabel pendidikan dan pendapatan untuk meneliti hubungannya dengan partisipasi politik.
- b. Partisipasi pemilih pemula adalah keterlibatan/keikutsertaan pemilih pemula dalam Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013.

2. Operasional Variabel

Variabel-variabel yang diteliti perlu didefinisikan secara operasional untuk mempermudah dan membatasi penelitian. Pemberian skor pada masing-masing indikator didasarkan dari 3 hipotesis yang dirumuskan. Skor yang tertinggi berarti semakin mendekati hipotesis, sedangkan skor terendah menunjukkan makin berlawanan/bertentangan dengan hipotesis. Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Bebas/ *Independent Variable* (X) dalam penelitian ini adalah Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga yang terdiri dari:

Tabel 4. Variabel Pendidikan (X₁)

Variabel	Indikator	Item
Tingkat Sosial Ekonomi (Pendidikan)	Pendidikan Formal	a. SD b. SMP c. SMA d. S1/S2/S3

Tabel 5. Variabel Pendapatan (X₂)

Variabel	Indikator	Item
Tingkat Sosial Ekonomi (Pendapatan)	Pendapatan Orangtua	1. Pekerjaan Utama. 2. Pekerjaan Sampingan.

b. Variabel Terikat/ *Dependent Variable* (Y) dalam penelitian ini adalah Partisipasi Pemilih Pemula yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Variabel Partisipasi Pemilih Pemula (Y)

Variabel	Indikator	Item
Partisipasi Politik Pemilih Pemula	<p>1. Pengetahuan Pemilih Pemula terhadap Pasangan Calon Walikota Malang 2013.</p> <p>2. Keterlibatan Pemilih Pemula dalam Kampanye Calon Walikota Malang 2013.</p> <p>3. Penggunaan Hak Suara Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang 2013.</p> <p>4. Sikap Pemilih Pemula terhadap Politik khususnya pada Pemilu Walikota Malang 2013.</p>	<p>a. Porsi pengetahuan pemilih pemula terhadap Calon Walikota.</p> <p>b. Kapan pemilih pemula mengetahui Calon Walikota.</p> <p>c. Melalui siapa pemilih pemula mengetahui Calon Walikota.</p> <p>a. Keterlibatan dalam kampanye.</p> <p>b. Sifat kedatangan dalam kampanye.</p> <p>c. Bentuk partisipasi dalam kampanye.</p> <p>a. Penggunaan hak suara pada Pemilu.</p> <p>b. Kedatangan pemilih pemula ke TPS.</p> <p>c. Penentuan pilihan pemilih pemula pada Pemilu.</p> <p>a. Keikutsertaan pemilih pemula pada penghitungan suara di TPS masing-masing</p> <p>b. Keikutsertaan pemilih pemula dalam perkembangan hasil perolehan suara.</p> <p>c. Sikap pemilih pemula terhadap kehidupan berpolitik.</p>

F. Hasil Analisis Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel-variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Di dalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala yang ingin diukur.

Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai *pearson correlation* dan *Sig. (2-tailed)*. Jika Nilai *pearson correlation* > nilai pembanding berupa *r-kritis* (dari tabel), maka item tersebut valid. Karena jumlah responden sejumlah 270 orang maka peneliti menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10%. Nilai *r-kritis* (dari tabel) X1, X2, dan Y sebesar 0.08 (signifikansi 10%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

Item	Pearson Correlation	Keterangan
X1	0,544	Valid
X2	0,601	Valid
Y	0,466	Valid

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 20)

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk mengukur apakah suatu instrumen cukup dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah valid. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antara item dengan menggunakan *Alpha Cronbach* yaitu dengan membandingkan koefisien alpha dengan 0.6.

Pada hasil pengolahan data menggunakan SPSS 20 untuk uji Reabilitas, didapatkan nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0.707 dari 5 item yang dipakai sehingga instrument penelitian tersebut reliable. Dari pengujian instrumen penelitian didapatkan kesimpulan bahwa instrumen penelitian yang dipakai sudah *valid* dan *reliable*.

G. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Hasan (2006:24), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Menurut (Sudjana, 2001:128), pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Tenik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputerisasi program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan

kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugianto, 2007:1).

Pengolahan data menurut Hasan (2006:24) meliputi kegiatan:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan editing berupa pengoreksian jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden di dalam kuesioner agar data yang akan di input tersusun dengan rapi.

b. *Coding* (Pengkodean)

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan di analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kode-kode tertentu berupa angka yang mewakili butir-butir instrumen kuesioner yang tentunya akan lebih memudahkan dalam hal memasukkan data.

c. Pemberian skor atau nilai

Dalam pemberian skor digunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2007:90), skala pengukuran dengan tipe Guttman akan memberikan jawaban yang tegas; yaitu dengan pilihan ya-tidak, benar-salah, pernah-tidak pernah, dan seterusnya. Data yang diperoleh dapat

berupa data interval atau rasio. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan skor/ nilai pada setiap opsi jawaban butir-butir instrumen kuesioner antara 1-5.

d. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Langkah awal peneliti untuk menganalisis adalah menyusun dan memilah-milah data dalam Microsoft Excel yang kemudian dimasukkan ke dalam SPSS.

Analisis Data menurut Hasan (2006:29) adalah memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan/ meramalkan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan bantuan wawancara tertutup.

H. Paradigma Penelitian

Korelasi *Product Moment*, Korelasi Ganda dan Korelasi Parsial.

a. Korelasi *Product Moment*

Menurut Hasan, (2006:34). Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau

lebih adalah sama. Berikut ini adalah rumus paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi.

$$r_{XY} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2 y^2)}}$$

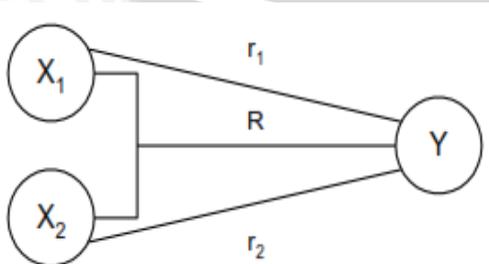
Dimana:

r_{xy} = korelasi antara variabel x dan y x = $(X_i - \bar{X})$ y = $(Y_i - \bar{Y})$ $r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$
--

Dan pada penelitian ini, korelasi *product moment* digunakan untuk menguji koefisien variabel tingkat ekonomi sosial orang tua (X_0) dengan variabel partisipasi pemilih pemula pada Pilwali Kota Malang Tahun 2013 (Y).

b. Korelasi Ganda

Menurut Hasan, (2006:34). Korelasi pada (*multiple correlation*) merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama – sama atau lebih dengan variabel lain. Berikut adalah pemahaman korelasi ganda yang digunakan dalam penelitian ini.



Keterangan:

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Jumlah Pendapatan

Y = Partisipasi Pemilih Pemula

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa korelasi ganda R , bukan merupakan penjumlahan dari korelasi sederhana yang ada pada setiap variabel ($r_1 - r_2$). Jadi $R \neq (r_1 + r_2)$. Korelasi ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antara X_1 dan X_2 dengan Y .

Dan untuk pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus berikut yaitu dengan uji F.

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

c. Korelasi Parsial

Menurut Hasan, (2006:34). Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, dimana salah satu variabel independennya dibuat tetap/dikendalikan. Jadi korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel

setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. Berikut merupakan rumus untuk korelasi parsial.

$$R_{y \cdot x_1 x_2} = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} r_{x_1 x_2}}{\sqrt{1 - r_{x_1 x_2}^2} \cdot \sqrt{1 - r_{yx_2}^2}}$$

Dapat dibaca: korelasi antara X_1 dengan Y , nilai variabel X_2 dikendalikan atau korelasi antara X_1 dan Y bila X_2 tetap.

Untuk koefisien korelasi parsial dapat digunakan dengan rumus:

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_p^2}}$$

Keterangan:

t tabel dicari dengan $dk = n-1$



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum Lokasi Kota Malang

1.1. Sejarah Kota Malang

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan percampian dan arca-arca, bekas-bekas fondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan.

Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama "Malang". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malanguçęwara (baca: Malangkusheswara) yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang.

Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkuçęwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, disebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang.

Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuca yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari.

Kota malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

- a. Tahun 1767 Kompeni Hindia Belanda memasuki Kota
- b. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
- c. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
- d. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
- e. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
- f. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
- g. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
- h. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- i. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
- j. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.
(www.malangkota.go.id diakses pada tanggal 10 Juni 2014).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan akan terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya ekonomi dan politiknya. Dalam proses perkembangannya diperlukan suatu “perangkat” pengendali yang mampu memberikan arah, dan panduan kebijakan bagi semua pengambil keputusan serta seluruh stakeholders di kota Malang.

1.2. Keadaan Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letak yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
(www.malangkota.go.id diakses pada tanggal 10 Juni 2014).

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

2. Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

2.1. Letak Geografis

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang. Secara geografis Kecamatan Lowokwaru berada di ketinggian 440-

460 meter di atas permukaan air laut dan pada posisi 112.60° – 112.63° Bujur Timur, 7.91° – 7.95° Lintang Selatan.

Posisi Kecamatan Lowokwaru berada di tengah-tengah Kota Malang. Batas Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Klojen dan Sukun dan Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang.

Luas wilayah Kecamatan Lowokwaru sebesar 22,6 km² yang terbagi dalam 12 Kelurahan. Dari 12 kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Merjosari (3,36 km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Dinoyo (1,17 km²).

Kelurahan Tulusrejo merupakan Kelurahan terdekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan Kelurahan Tasikmadu merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan.

2.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Lowokwaru dari hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 186.013 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 91.616 jiwa dan 94.397 jiwa penduduk perempuan. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Lowokwaru sebesar 97,05% yang artinya dari 97-98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kecamatan

Lowokwaru dari hasil penghitungan Sensus Penduduk 2010 sebesar 1,98% pertahun.

Kepadatan penduduk Kecamatan Lowokwaru tahun 2010 sebesar 8.231 jiwa/km². Dari 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo merupakan Kelurahan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi 14.680 jiwa/km², sedangkan Kelurahan Tasikmadu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah (2.336 jiwa/km²).

2.3. Sarana Umum

Salah satu program pembangunan manusia adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kecamatan Lowokwaru telah tersedia sarana pendidikan pada berbagai jenjang baik SD, SMP maupun SMA.

Untuk jenjang SD/MI baik negeri maupun swasta terdaftar 63 lembaga pada tahun 2012, jenjang SMP/MTs terdaftar sebanyak 17 lembaga sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA terdaftar sebanyak 25 lembaga.

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Malang menyediakan sarana kesehatan dengan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk Kecamatan Lowokwaru sarana kesehatan tersebut berada di 3 Kelurahan.. Selain itu terdapat satu Rumah Sakit Umum.

3. Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

3.1. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Kedungkandang berada pada posisi $112^{\circ} 36' 14'' - 112^{\circ} 40' 42''$ Bujur Timur dan $007^{\circ} 36' 38'' - 008^{\circ} 01' 57''$ Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang terletak di sebelah Timur dan Tenggara wilayah Kota Malang, yang mana sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen serta Kecamatan Blimbing sedangkan sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang. Pegunungan Baran membentang di 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Tlogowaru, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Madyopuro serta Cemorokandang serta dilewati beberapa sungai yang besar diantaranya sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar $39,89 \text{ km}^2$. Wilayah Kedungkandang terbagi menjadi 12 Kelurahan. Wilayah Kelurahan yang paling Luas adalah Kelurahan Wonokoyo yaitu $5,58 \text{ km}^2$ sedangkan Kelurahan yang paling sempit adalah kelurahan Mergosono dengan luas sebesar $0,56 \text{ km}^2$. Kadar udara rata-rata masih mencapai 24° C dengan kelembaban 7,26%.

3.2. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk di wilayah Kedungkandang sejumlah 174.477 jiwa. Hasil sensus penduduk tercatat jumlah

penduduk laki-laki 86.849 jiwa sedangkan perempuan 87.628 jiwa, sehingga rasionya sebesar 99,11 yang berarti setiap ada 99 laki-laki ada 100 perempuan.

3.3. Sarana Umum

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang tahun 2012 untuk jenjang SD dan MI sejumlah 72 lembaga, untuk jenjang SMP dan MTs sejumlah 24 lembaga, untuk jenjang SMA dan MA sejumlah 8 lembaga sedangkan untuk SMK sejumlah 5 lembaga.

Jumlah sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Kedungkandang terinci sebagai berikut, 2 Rumah Sakit Swasta, 3 Puskesmas, 9 Puskesmas Pembantu dan 3 Rumah Bersalin.

4. Gambaran Umum Kecamatan Sukun Kota Malang

4.1. Letak Geografis

Kecamatan Sukun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang. Secara geografis Kecamatan Sukun berada di ketinggian 440-460 meter di atas permukaan air laut dan pada posisi 112.61° – 112.63° Bujur Timur, 7.96° – 8.00° Lintang Selatan.

Posisi Kecamatan Sukun berada di selatan Kota Malang. Batas wilayah Kecamatan Sukun sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang.

Luas wilayah Kecamatan Sukun sebesar 20,97 km² yang terbagi dalam 11 Kelurahan. Dari 11 kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Karang Besuki (3,04 km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Ciptomulyo (0,83 km²).

Kelurahan Bandungrejosari merupakan Kelurahan terdekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan Kelurahan Mulyorejo merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan.

4.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Sukun dari hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 181.513 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 90.217 jiwa dan 91.296 jiwa penduduk perempuan. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Sukun sebesar 98,82% yang artinya dari 98-99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Sukun dari hasil penghitungan Sensus Penduduk 2010 sebesar 1,14% pertahun.

Kepadatan penduduk Kecamatan Sukun tahun 2010 sebesar 8.656 jiwa/km². Dari 11 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo merupakan Kelurahan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi 27.667 jiwa/km², sedangkan Kelurahan Karang Besuki merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah (5.904 jiwa/km²).

4.3. Sarana Umum

Salah satu program pembangunan manusia adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kecamatan Sukun telah tersedia sarana pendidikan pada berbagai jenjang baik SD, SMP maupun SMA.

Untuk jenjang SD/MI baik negeri maupun swasta terdaftar 67 lembaga pada tahun 2012, jenjang SMP/MTs terdaftar sebanyak 17 lembaga sedangkan untuk jenjang SMA/MA terdaftar sebanyak 15 lembaga.

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Malang menyediakan sarana kesehatan dengan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk Kecamatan Sukun sarana kesehatan tersebut berada di 3 Kelurahan. Selain itu juga terdapat satu Rumah Sakit Umum.

5. Gambaran Umum Kecamatan Klojen Kota Malang

5.1. Letak Geografis

Kecamatan Klojen merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang. Secara geografis Kecamatan Klojen berada di ketinggian 420-460 meter di atas permukaan air laut dan pada posisi 112.36° – 112.40° Bujur Timur, 7.36° – 8.01° Lintang Selatan.

Posisi Kecamatan Klojen berada di tengah-tengah Kota Malang. Batas Wilayah Kecamatan Klojen sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Blimbing, sebelah selatan

berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lowokwaru dan Sukun.

Luas wilayah Kecamatan Klojen sebesar 8,83 km² yang terbagi dalam 11 Kelurahan. Dari 11 kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Oro-oro Dowo (1,38 km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Kidul Dalem (0,49 km²).

Kelurahan Gading Kasri merupakan Kelurahan terdekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan Kelurahan Rampal Celaket merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan.

5.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Klojen dari hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 105.907 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 50.451 jiwa dan 55.456 jiwa penduduk perempuan. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Klojen sebesar 90,97% yang artinya dari 90-91 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Klojen dari hasil penghitungan Sensus Penduduk 2010 menunjukkan angka minuss yaitu -1,96% pertahun. Artinya penduduk Kecamatan Klojen selama periode 10 tahun tidak mengalami penambahan tetapi pengurang sebesar 1,96% per tahunnya.

Kepadatan penduduk Kecamatan Sukun tahun 2010 sebesar 11.994 jiwa/km². Dari 11 Kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen, Kelurahan

Rampal Celaket merupakan Kelurahan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi 50.820 jiwa/km², sedangkan Kelurahan Gading Kasri merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah (7.974 jiwa/km²).

5.3. Sarana Umum

Salah satu program pembangunan manusia adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kecamatan Klojen telah tersedia sarana pendidikan pada berbagai jenjang baik SD, SMP maupun SMA.

Untuk jenjang SD/MI baik negeri maupun swasta terdaftar 48 lembaga pada tahun 2012, jenjang SMP/MTs terdaftar sebanyak 29 lembaga sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA terdaftar sebanyak 30 lembaga.

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Malang menyediakan sarana kesehatan dengan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk Kecamatan Klojen sarana kesehatan tersebut berada di 3 Kelurahan. Pusat Kesehatan secara umum berada di Kecamatan Klojen. Terdapat 3 Rumah Sakit Umum, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Syaiful Anwar. Selain itu terdapat 7 rumah sakit umum swasta dan rumah sakit bersalin.

6. Gambaran Umum Kecamatan Blimbing Kota Malang

6.1. Letak Geografis

Kecamatan Blimbing merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang. Secara geografis Kecamatan Blimbing berada di ketinggian 400-525 meter di atas permukaan air laut dan pada posisi 112.63° – 112.65° Bujur Timur, 7.92° – 7.98° Lintang Selatan.

Posisi Kecamatan Blimbing berada di tengah-tengah Kota Malang. Batas Wilayah Kecamatan Blimbing sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kabupaten Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Klojen dan Lowokwaru dan Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lowokwaru.

Luas wilayah Kecamatan Blimbing sebesar $17,76 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 11 Kelurahan. Dari 11 kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Pandanwangi ($3,98 \text{ km}^2$), sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Jodipan ($0,49 \text{ km}^2$).

Kelurahan Arjosari merupakan Kelurahan terdekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan Kelurahan Jodipan merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan.

6.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Blimbing dari hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 172.333 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 85.420 jiwa dan 86.913 jiwa penduduk perempuan. Dari

gambaran tersebut terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Blimbing sebesar 98,28% yang artinya dari 98-99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Blimbing dari hasil penghitungan Sensus Penduduk 2010 sebesar 0,76% pertahun.

Kepadatan penduduk Kecamatan Blimbing tahun 2010 sebesar 9.698 jiwa/km². Dari 11 Kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing, Kelurahan Jodipan merupakan Kelurahan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi 23.547 jiwa/km², sedangkan Kelurahan Balarjosari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah (5.179 jiwa/km²).

6.3. Sarana Umum

Salah satu program pembangunan manusia adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kecamatan Blimbing telah tersedia sarana pendidikan pada berbagai jenjang baik SD, SMP maupun SMA.

Untuk jenjang SD/MI baik negeri maupun swasta terdaftar 58 lembaga pada tahun 2012, jenjang SMP/MTs terdaftar sebanyak 21 lembaga sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA terdaftar sebanyak 15 lembaga.

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Malang menyediakan sarana kesehatan dengan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk Kecamatan Blimbing sarana kesehatan tersebut berada di 3 Kelurahan.. Selain itu terdapat satu Rumah Sakit Umum.

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 270 pemilih pemula di Kota Malang yang berasal dari penghitungan jumlah responden melalui tabel *Isaac* dan *Michael* dalam Sugiyono (2013:128). Dari 270 responden tersebut dibagi sama rata di 5 Kecamatan, dan setiap Kecamatannya terdapat 54 responden. Penentuan responden di tiap-tiap Kecamatan menggunakan sistem *Spot Random Sampling*, di 5 Kantor Kecamatan Kota Malang. Berdasarkan jumlah responden yang telah diteliti dapat diambil beberapa gambaran indentitas responden mengenai jenis kelamin, usia, dan status perkawinan. Gambaran masing-masing responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 8. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki-Laki	144	53.3
Perempuan	126	46.6
Total	270	100

(Sumber: Data kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 144 orang (53.3%), dan selainnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 126 orang (46.6%).

Tabel 9. Gambaran Responden Berdasarkan Usia.

Usia	Frekuensi	Persen (%)
<17 Tahun (Sudah Menikah)	0	0
17 Tahun	21	7.7
18 Tahun	43	15.9
19 Tahun	75	27.7
20 Tahun	79	29.2
21 Tahun	52	19.2
Total	270	100

(Sumber: Data kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.2 rentang usia yang dicantumkan hanya 17-21 tahun karena pada dasarnya pemilih pemula adalah yang berusia 17-21 tahun atau sudah menikah . Dari tabel tersebut didapatkan bahwa responden yang berusia < 17 tahun namun sudah menikah tidak ada (0%), 17 tahun sebanyak 21 orang (7.7%), berusia 18 tahun sebanyak 43 orang (15.9%), berusia 19 tahun sebanyak 75 orang (27.7%), berusia 20 tahun sebanyak 79 orang (29.2%), berusia 21 tahun sebanyak 52 orang (19.2%). Dapat disimpulkan bahwa usia yang mendominasi responden yang ada adalah kelompok usia 20 tahun sebanyak 79 orang (29.2%).

Tabel 10. Gambaran Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Frekuensi	Persen (%)
Belum	263	97.4
Sudah	7	2.6
Total	270	100

(Sumber: Data kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar pemilih pemula yang belum menikah sebanyak 263 orang (97.4%) dan yang sudah menikah sebanyak 7 orang (2.6%). Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula pada Pemilihan Umum Walikota Malang tahun 2013 didominasi oleh pemilih pemula yang belum menikah.

C. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Dengan adanya analisis deskriptif maka akan lebih mudah diketahui item variable-variabel pendidikan (X1), pendapatan (X2) dan partisipasi politik pemilih pemula (Y), secara keseluruhan yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner baik disajikan dalam angka maupun dalam presentase.

a. Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan (X1)

Pada 2 item pertanyaan yang diajukan mengenai variabel pendidikan diperoleh jawaban seperti tampak pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan (X1)

No.	Item	Opsis	Jumlah	
			f	%
1.	Ijazah terakhir yang dimiliki ayah saudara	a. Sarjana (S1, S2, S3)	61	22,59
		b. SMA/SMK	125	46,29
		c. SMP	48	17,77
		d. SD/ Buta huruf	36	13,33
2.	Ijazah terakhir yang dimiliki ibu saudara	a. Sarjana (S1, S2, S3)	50	18,51
		b. SMA/SMK	106	39,25
		c. SMP	75	27,77
		d. SD/ Buta huruf	39	14,44

(Sumber: Data Kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.6, distribusi frekuensi variabel X1 (Pendidikan) dapat diambil kesimpulan bahwa pada item Ijazah terakhir yang dimiliki oleh ayah responden sebagian besar menjawab SMA/SMK sebanyak 125 responden (46,29%). Item Ijazah terakhir yang dimiliki oleh ibu responden sebagian besar menjawab SMA/SMK sebanyak 106 responden (39,25%)

b. Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan (X₂)

Pada 8 item pertanyaan yang diajukan mengenai variabel pendidikan diperoleh jawaban seperti tampak pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan (X₂)

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
1.	Jenis pekerjaan utama ayah	a. PNS atau TNI/POLRI (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	67	24,81
		b. Pegawai Swasta (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	69	25,55
		c. Wiraswasta	102	37,77
		d. Petani	15	5,55
		e. Lainnya	17	6,29
2.	Besarnya penghasilan pekerjaan utama ayah	a. > Rp. 3.000.000,-	100	37,03
		b. ≥ Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-	86	31,85
		c. ≥ Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-	51	18,88
		d. < Rp. 1.000.000,-	33	12,22
3.	Jenis pekerjaan sampingan ayah	a. Pegawai Swasta (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	5	1,85
		b. Wiraswasta	72	26,66
		c. Petani	15	5,55
		d. Lainnya	19	7,03
		Tidak menjawab	159	58,88
4.	Besarnya penghasilan pekerjaan sampingan ayah	a. > Rp. 3.000.000,-	24	8,88
		b. ≥ Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-	17	6,29
		c. ≥ Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-	38	14,07
		d. < Rp. 1.000.000,-	32	11,85
		Tidak menjawab	159	58,88
5.	Jenis pekerjaan utama ibu	a. PNS atau TNI/POLRI (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	22	8,14
		b. Pegawai Swasta (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	39	14,44
		c. Wiraswasta	32	11,85
		d. Petani	12	4,44
		e. Lainnya	3	1,11

No.	Item	Opsis	Jumlah	
			f	%
		Tidak menjawab	162	60
6.	Besar penghasilan pekerjaan utama ibu	a. > Rp. 3.000.000,-	10	3,70
		b. \geq Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-	21	7,77
		c. \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-	48	17,77
		d. < Rp. 1.000.000,-	28	10,37
		Tidak menjawab	162	60
7.	Jenis pekerjaan sampingan ibu	a. Pegawai Swasta (Pimpinan Atas/ Pimpinan Menengah/ Pimpinan Bawah/ Pegawai Biasa)	10	3,77
		b. Wiraswasta	13	4,81
		c. Petani	2	0,74
		d. Lainnya	3	1,11
		Tidak menjawab	242	89,62
8.	Besar penghasilan pekerjaan sampingan ibu	a. > Rp. 3.000.000,-	4	1,48
		b. \geq Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-	9	3,33
		c. \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-	12	4,44
		d. < Rp. 1.000.000,-	4	1,48
		Tidak menjawab	242	89,62

(Sumber: Data Kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.5, distribusi frekuensi variabel X₂ (Pendapatan) dapat diambil kesimpulan bahwa pada item jenis pekerjaan tertinggi ayah sebagian besar menjawab Pegawai Swasta sebanyak 69 responden (25,55%). Item besar penghasilan pekerjaan utama ayah sebagian besar menjawab > Rp. 3.000.000,- sebanyak 100 responden (37,03%). Item jenis pekerjaan sampingan ayah sebagian besar menjawab wiraswasta sebanyak 72 responden (26,66%). Item besar penghasilan pekerjaan sampingan ayah sebagian besar menjawab \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- sebanyak 38 responden (14,07%). Item Jenis pekerjaan utama ibu sebagian besar menjawab pegawai swasta sebanyak 39 responden (14,44%). Item besar penghasilan pekerjaan utama ibu sebagian

besar menjawab \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- sebanyak 48 responden (17.77%). Item jenis pekerjaan sampingan ibu sebagian besar menjawab wiraswasta sebanyak 13 responden (4,81%). Item besar penghasilan pekerjaan sampingan ibu sebagian besar menjawab \geq Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- sebanyak 12 responden (4.44%).

c. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Politik Pemilih Pemula(Y)

Pada 12 item pertanyaan yang diajukan mengenai variabel partisipasi politik pemilih pemula diperoleh jawaban seperti tampak pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Y)

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
1.	Apakah saudara mengetahui pasangan Walikota pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013	a. Mengetahui semua calon walikota	20	7.40
		b. Mengetahui sebagian besar calon walikota	40	14.81
		c. Mengetahui sebagian kecil calon walikota	114	42.22
		d. Tidak mengetahui sama sekali	96	35.55
2.	Kapan saudara mengetahui pasangan calon Walikota pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013	a. Sebelum masa pencalonan walikota	18	6.66
		b. Sebelum kampanye (aktif maupun pasif)	51	18.88
		c. Pada saat kampanye (aktif maupun pasif)	71	26.29
		d. Saat pencoblosan	34	12.59
		Tidak menjawab (apabila tidak mengetahui sama sekali)	96	35.55
3.	Dari siapakah saudara mengetahui pasangan calon Walikota pada	a. Orang tua	57	21.11
		b. Teman/ Rekan Kerja/ Tetangga/ Guru	23	8.51
		c. Media (Cetak/ Elektronik)	31	11.48
		d. Mengetahui dengan sendirinya	63	23.33

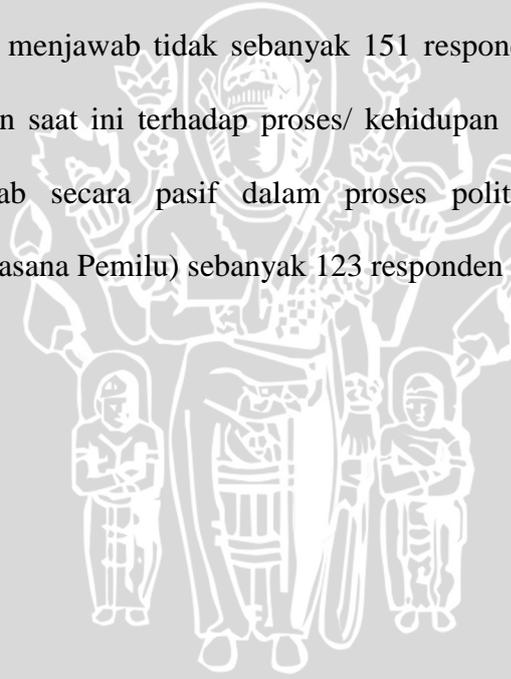
No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
	Pilkada Walikota Malang tahun 2013	Tidak menjawab (apabila tidak mengetahui sama sekali)	96	35.55
4.	Apakah saudara terlibat dalam kegiatan kampanye (termasuk dengan segala aktivitas yang mengandung unsur pencitraan diri) Pilkada Walikota Malang tahun 2013	a. Ya	78	28.88
		b. Tidak	192	71.11
5.	Dalam menghadiri kegiatan kampanye Pilkada Walikota Malang tahun 2013 saudara datang:	a. Dengan kesadaran sendiri	12	4.44
		b. Dengan ajakan orang lain	30	11.11
		c. Karena melihat orang-orang banyak yang datang	36	13.33
		d. Karena diberi imbalan berupa materi	0	0
		Tidak menjawab (Apabila tidak mengikuti kampanye)	192	71.11
6.	Bagaimana bentuk partisipasi saudara dalam kegiatan kampanye Pilkada Walikota Malang tahun 2013	a. Memberikan sumbangan berupa uang/ peralatan logistik	0	0
		b. Memberikan sumbangan berupa tenaga sukarelawan	24	8.88
		c. Hanya sekedar meramaikan suasana kampanye/ ikut-ikutan	53	19.62
		d. Meramaikan suasana kampanye karena diberi uang/ materi oleh parpol yang mengusung pasangan calon	1	0.37
		Tidak menjawab (Apabila tidak mengikuti kampanye)	192	71.11
7.	Apakah saudara menggunakan hak suara/ mencoblos dalam Pilkada Walikota Malang tahun 2013	a. Ya	209	77.40
		b. Tidak	61	22.59
8.	Pada pelaksanaan Pilkada Walikota Malang tahun 2013, apakah saudara	a. Dengan kesadaran sendiri	124	45.92
		b. Dengan ajakan orang lain	64	23.70
		c. Karena melihat orang-orang banyak yang datang	21	7.77

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
	datang ke TPS:	Tidak menjawab (Apabila tidak menggunakan hak suara)	61	22.59
9	Dalam menentukan pilihan/ memberikan hak suara pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013, saudara:	a. Memberikan suara/ mencoblos sesuai pilihan pribadi	58	21.48
		b. Memberikan suara/ mencoblos sesuai pilihan orang tua	110	40.74
		c. Memberikan suara/ mencoblos sesuai pilihan teman/ rekan kerja	21	7.77
		d. Memberikan suara/ mencoblos sesuai permintaan salah satu parpol yang mengusung pasangan calon karena diberi uang	20	7.40
		Tidak menjawab (Apabila tidak menggunakan hak suara)	61	22.59
10	Apakah saudara mengikuti kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing	a. Ya	84	31.11
		b. Tidak	186	68.88
11	Apakah saudara mengikuti perkembangan hasil perolehan suara/ <i>quick count</i> melalui media (cetak/ elektronik) hingga terpilihnya Walikota Malang tahun 2013	a. Ya	119	44.07
		b. Tidak	151	55.92
12	Bagaimanakah sikap saudara saat ini terhadap proses/ kehidupan berpolitik	a. Secara aktif terlibat dalam proses politik sebagai (Komunikator/ Aktivis Partai/ Aktivis Masyarakat)	33	12.22
		b. Secara pasif dalam proses politik (hanya sekedar meramaikan suasana Pemilu)	123	45.55
		c. Tidak menyukai/ benci terhadap kehidupan politik	72	26.66
		d. Tidak mau tahu/acuh terhadap kehidupan politik	42	15.55

(Sumber: Data Kuesioner)

Berdasarkan tabel 4.6 Variabel kinerja pegawai (Y) pada 5 Kecamatan di Kota Malang secara keseluruhan sudah cukup baik. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk item pengetahuan pasangan Walikota pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar responden menjawab mengetahui sebagian kecil calon walikota sebanyak 114 responden (42.22%). Item kapan mengetahui pasangan calon Walikota pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab sebelum kampanye (aktif maupun pasif) sebanyak 71 responden (26.29%). Item dari siapakah mengetahui pasangan calon Walikota pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab mengetahui dengan sendirinya sebanyak 57 responden (21.11%). Item apakah terlibat dalam kegiatan kampanye (termasuk dengan segala aktivitas yang mengandung unsur pencitraan diri) Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab tidak sebanyak 192 responden (71.11%). Item menghadiri kegiatan kampanye Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab karena melihat orang-orang banyak yang datang sebanyak 36 responden (13.33%). Item bentuk partisipasi dalam kegiatan kampanye Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab hanya sekedar meramaikan suasana kampanye/ ikut-ikutan sebanyak 53 responden (19.62%). Item menggunakan hak suara/ mencoblos dalam Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab ya sebanyak 209 responden (77.40%). Item pada pelaksanaan Pilkada Walikota Malang tahun 2013 datang ke TPS, sebagian besar menjawab

dengan kesadaran sendiri sebanyak 124 responden (45.92%). Item dalam menentukan pilihan/ memberikan hak suara pada Pilkada Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab memberikan suara/ mencoblos sesuai pilihan orang tua sebanyak 110 responden (40.74%). Item mengikuti kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing, sebagian besar menjawab tidak sebanyak 186 responden (68.88%). Item mengikuti perkembangan hasil perolehan suara/ *quick count* melalui media (cetak/ elektronik) hingga terpilihnya Walikota Malang tahun 2013, sebagian besar menjawab tidak sebanyak 151 responden (55.92%). Item sikap responden saat ini terhadap proses/ kehidupan berpolitik, sebagian besar menjawab secara pasif dalam proses politik (hanya sekedar meramaikan suasana Pemilu) sebanyak 123 responden (45.55%).



D. Analisis Data

1. Korelasi Sederhana (*Product Moment*).

Tabel 14. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi (Pendidikan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013

Correlations			
		Pendidikan (X1)	Partisipasi Politik (Y)
Pendidikan (X1)	Pearson Correlation	1	.527**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	270	270
Partisipasi Politik (Y)	Pearson Correlation	.527**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 15. Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono 2013:184)

Hasil perhitungan SPSS 20.0 pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa korelasi antara pendidikan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula termasuk cukup kuat yaitu sebesar 0,527. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang artinya jika pendidikan orangtua tinggi, maka partisipasi pemilih pemula juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan orangtua rendah maka partisipasi pemilih pemula juga akan

rendah. Pada tabel output didapatkan bahwa nilai Sig (2-tailed) = 0,000 karena nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula.

Tabel 16. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua (Pendapatan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013

Correlations			
		Pendapatan (X2)	Partisipasi Politik (Y)
Pendapatan (X2)	Pearson Correlation	1	.386**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	270	270
Partisipasi Politik (Y)	Pearson Correlation	.386**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan SPSS 20.0 pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula termasuk rendah yaitu sebesar 0,386. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang artinya jika pendidikan orangtua tinggi, maka partisipasi pemilih pemula juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan orangtua rendah maka partisipasi pemilih pemula juga akan rendah. Pada tabel output didapatkan bahwa nilai Sig (2-tailed) = 0,000 karena nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka disimpulkan terdapat hubungan

yang signifikan antara pendapatan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula.

2. Korelasi Berganda

Tabel 17. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua (Pendidikan dan Pendapatan) dengan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2013

a Predictors: (Constant), x2, x1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812(a)	,659	,655	,55972

a Predictors: (Constant), x1, x2

Sumber : Analisis Data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua dengan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Kota Malang Tahun 2013 yaitu sebesar 81,2%. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang artinya jika tingkat pendidikan dan pendapatan orangtua tinggi, maka partisipasi pemilih pemula juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pendidikan dan pendapatan orangtua rendah maka partisipasi pemilih pemula juga akan rendah.

3. Korelasi Parsial

**Tabel 18. Hasil Uji Korelasi Parsial X1 terhadap Y dengan X2
Dikontrol
Correlations**

Control Variables		Pendidikan (X1)	Partisipasi Politik (Y)
Pendapatan (X2) Pendidikan (X1)	Correlation	1.000	.430
	Significance (2-tailed)	.	.002
	Df	0	267
Partisipasi Politik (Y)	Correlation	.430	1.000
	Significance (2-tailed)	.002	.
	Df	267	0

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 20)

Dari tabel 4.11. diperoleh korelasi antara pendidikan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula, bila variabel pendapatan orangtua dikontrol/dikendalikan sebesar 0,430. Angka ini lebih kecil dari korelasi yang langsung dan tanpa adanya kontrol dari variabel pendapatan ($0,430 < 0,527$). Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara pendidikan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi pendidikan orangtua maka semakin meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Nilai signifikan $0,002 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula.

**Tabel 19. Hasil Uji Korelasi Parsial X2 terhadap Y dengan X1
Dikontrol
Correlations**

Control Variables			Pendapatan (X2)	Kinerja Pegawai (Y)
Pendidikan (X1)	Pendapatan (X2)	Correlation	1.000	.315
		Significance (2-tailed)	.	.031
		Df	0	267
Kinerja Pegawai (Y)	Kinerja Pegawai (Y)	Correlation	.315	1.000
		Significance (2-tailed)	.031	.
		Df	267	0

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 20)

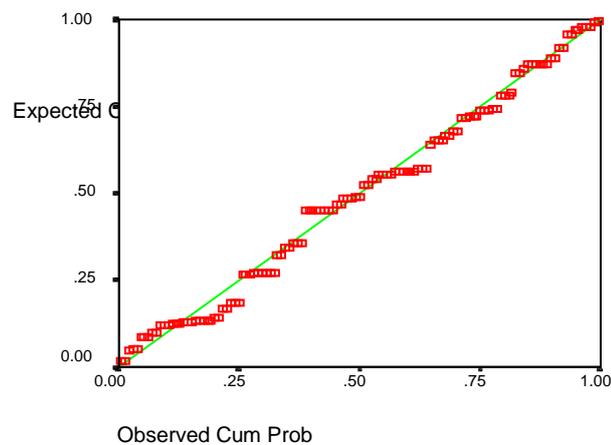
Dari tabel 4.12. diperoleh korelasi antara pendapatan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula, bila variabel pendidikan orangtua dikontrol/dikendalikan sebesar 0,315. Angka ini lebih kecil dari korelasi yang langsung dan tanpa adanya kontrol dari variabel pendapatan orangtua ($0,315 < 0,386$). Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat rendah antara pendapatan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi pendapatan orangtua maka semakin tinggi juga partisipasi pemilih pemula. Nilai signifikan $0,031 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan orangtua dengan partisipasi pemilih pemula.

4. Uji asumsi klasik

a. Uji Asumsi Klasik Normalitas

Untuk uji Normalitas dapat diketahui untuk masing-masing variabel berbentuk simetris dan terletak disekitar nilai means (rata-rata), sehingga dapat dikatakan uji normalitas yang ada adalah sesuai dengan ketentuan *central limit theorem* bahwa $\pm 68\%$ area dibawah kurva normal terletak diantara $\mu \pm \sigma$ atau sekitar 95% area dibawah kurva normal yang terletak pada nilai $\mu \pm 2 \sigma$.

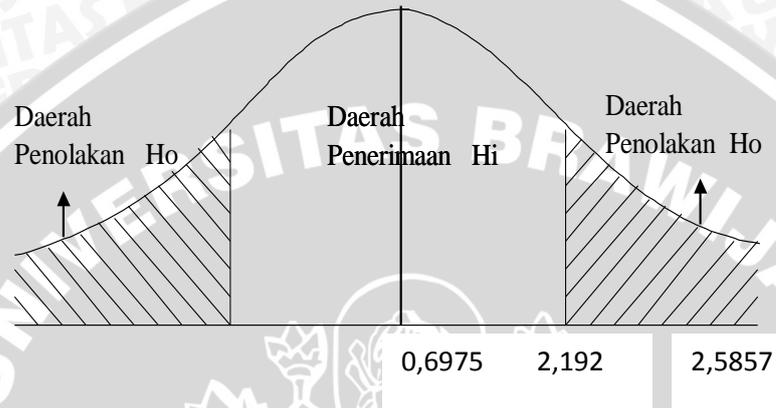
Gambar 2. Uji Normalitas



b. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Daerah Penolakan dan Penerimaan

Gambar 3. Autokorelasi Durbin-Watson



Di dalam mendeteksi gejala autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW). Hasil perhitungan Durbin Watson (DW) dibandingkan dengan nilai d tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah sebagai berikut :

Jika ; $d < d_l$; Terjadi autokorelasi positif

$d > 4 - d_l$; Terjadi autokorelasi negatif

$d_u < d < 4 - d_u$; tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan tabel statistik Durbin Watson (DW) di atas nilai kritis dari d_l dan d_u untuk $\alpha = 0,05$; $k = 4$, dan $n = 270$) adalah $d_l = 2,5857$ $d_u = 0,6975$. Bila dimasukkan ke dalam rumus kriteria : $2,192 < 2,5857 < 4 - 0,6975$ sehingga keputusannya adalah tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dideteksi menggunakan uji *Glejser* (*absolut residual*). Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas pada variabel independennya. Dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel independennya, maka juga tidak terdapat bias pada ketiga variabel independennya.

5. Uji F (Uji Simultan)

Untuk menguji ketepatan model yang diformulasikan dalam penelitian ini, dilakukan uji F. Apabila besarnya $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan SPSS diperoleh F_{hitung} sebesar 171,976, sedangkan F_{tabel} pada $\alpha = 5\%$, $df_1 = 3$, dan $df_2 = 270$ sebesar 8,55; hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($171,976 > 8,55$) sedangkan probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pula bahwa model penelitian ini menunjukkan variabel bebas variabel bebas (X_1), (X_2) berpengaruh signifikan terhadap terhadap variabel (Y).

6. Uji t (Uji Parsial)

Untuk menguji hipotesis yang diformulasikan dalam penelitian ini dilakukan uji t setelah melakukan uji F untuk menguji tingkat signifikan variabel bebas (X_1), (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y), maka digunakan uji t. Apabila

besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut ini disajikan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} masing-masing variabel bebas (X_1), (X_2), (Y).

Tabel 20. Perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel}

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. t	Keterangan
Y1	10,238	1,650	0,000	Signifikan
Y2	12,269	1,650	0,000	Signifikan

*) Setara Statistik Signifikan pada level $\alpha = 5\%$

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel bebas (X_1), (X_2) mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1), (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula (Y). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel bebas (X_1), (X_2) mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1), (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula (Y).

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel bebas (X_1), (X_2) secara bersama-sama terhadap partisipasi pemilih pemula secara statistik sepenuhnya terbukti.

7. Regresi Linear Berganda

Berdasarkan bantuan program SPSS 20 *for windows*, hasil pengolahan data. Dan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka rumus persamaan regresi linier yang digunakan adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh koefisien regresi seperti dalam tabel 4.13:

Tabel 21. Tabel Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	Standard Error	t hitung	P
Konstanta	1,427			
(X_1)	0,407	0,040	10,238	0,002*
(X_2)	0,540	0,044	12,269	0,000*

Keterangan : *) Secara statistik level $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan tabel di atas , maka persamaan regresi terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,427 + 0,407 X_1 + 0,540 X_2$$

Berdasarkan hasil regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a = artinya adalah konstanta yang artinya bahwa apabila tidak ada variabel bebas (X_1), (X_2) yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula (Y), maka besarnya variabel X_1 adalah 1,427 skala ukur, yang berarti bahwa partisipasi pemilih pemula akan mengalami kenaikan jika tidak ada variabel bebas (X_1), (X_2) yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula (Y).

b_1 = 0,407 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas (X_1) yang berarti setiap kenaikan atau penambahan 1 satuan variabel (X_1) akan menaikkan variabel partisipasi pemilih pemula (Y) sebesar 0,407 dengan asumsi variabel bebas (X_2) besarnya konstan.

b_2 = 0,540 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas (X_2) yang berarti setiap kenaikan atau penambahan 1 satuan variabel (X_2) akan menaikkan variabel partisipasi pemilih pemula (Y) sebesar 0,540 dengan asumsi variabel bebas yang lain seperti (X_1) besarnya konstan.

8. Koefisien Determinasi

Dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,659 sehingga dapat dikatakan 65,9% partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh variabel bebas (X_1), (X_2) sedangkan sisanya sebesar 34,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Gambaran umum mengenai tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan dan pendapatan) dan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum Walikota Malang tahun 2013 telah disesuaikan dengan kondisi pada saat peneliti melakukan penelitian di 5 Kecamatan di Kota Malang yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing.

Dari 270 responden keseluruhan yang dibagi rata menjadi 54 responden per Kecamatannya didapatkan hasil pengujian secara statistik bahwa secara linier maupun parsial terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan) dan variabel tingkat sosial ekonomi orangtua (pendapatan) terhadap variabel partisipasi pemilih pemula. Dan dari hasil pengujian tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penjelasan masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendidikan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula

Hasil pengujian hipotesis variabel X_1 telah menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan) terhadap partisipasi pemilih pemula. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pendidikan orangtua berpengaruh secara positif terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Walikota Malang tahun 2013.

2. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendapatan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula

Hasil pengujian hipotesis variabel X_2 telah menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat sosial ekonomi orangtua (pendapatan) terhadap partisipasi pemilih pemula. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pendapatan orangtua berpengaruh secara positif terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Walikota Malang tahun 2013.

3. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orangtua (Pendidikan dan Pendapatan) Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula

Hasil pengujian hipotesis telah menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan dan pendapatan) terhadap partisipasi pemilih pemula. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh F_{hitung} sebesar 171,976, sedangkan F_{tabel} pada $\alpha = 5\%$, $df_1 = 3$, dan $df_2 = 270$ sebesar 8,55; hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($171,976 > 8,55$) sedangkan probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti pula bahwa secara simultan variabel tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan dan pendapatan) mempunyai pengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Walikota Malang tahun 2013

Dari hasil analisis data diatas juga di dukung dengan pendapat Ruslan (dikutip dalam Setiajid, 2011) bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

1. Keyakinan agama yang diimani oleh individu,
2. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya, dan
3. Karakter lingkungan politik.

Ada juga yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula antara lain:

1. Faktor sosial ekonomi, meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jumlah pemilih pemula,
2. Faktor politik meliputi, komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan pemilih tentang proses politik,
3. Faktor fisik individual dan lingkungan, dan
4. Faktor nilai budaya

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh

faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politotoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tersebut.

Perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek yang dapat berupa pemerintah juga masyarakat. Dalam konteks perilaku politik, hal yang dipikirkan dan diinginkan tersebut berkaitan erat dengan orientasi politik yakni kekuasaan dimana kekuasaan itu diperolehnya dengan suatu proses pemilihan. Walaupun secara teoritis, penjelasan tentang perilaku yang muncul dari perbedaan sikap sudah terlihat jelas, namun sikap bukan sesuatu yang bisa begitu saja terjadi.

Sikap terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang, mulai manusia baru lahir sampai dewasa. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula adalah sebagai berikut antara lain adalah (1) faktor sosial ekonomi, meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah siswa.

Hal ini menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi siswa sebagai pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik; (2) faktor politik, meliputi: (a) komunikasi politik yaitu suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik, (b) kesadaran politik, yaitu menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik pengetahuan siswa sebagai pemilih pemula terhadap proses pengambilan keputusan, dan (c) pengetahuan siswa sebagai pemilih pemula terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil; (3) faktor fisik individu dan lingkungan, sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum; dan (4) faktor nilai budaya yang merupakan basis yang membentuk demokrasi, menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul perilaku itu. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Klasifikasi tipe- tipe orientasi politik, adalah (1) orientasi kognitif, yakni pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya, (2) orientasi afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan

aktor dan penampilannya, (3) orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Orientasi seseorang terhadap obyek-obyek politik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. (1) Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik, (2) Orientasi Negatif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap obyek politik, dan (3) Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik pemilih pemula berdasarkan penelitian ini menunjukkan ke arah orientasi positif baik dalam orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif. Hal ini menunjukkan orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini difokuskan pada hubungan tingkat sosial ekonomi orangtua terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013. Tingginya pertumbuhan populasi pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun di Kota Malang sekitar 9,7% dalam 15 tahun terakhir atau 3 kali periode pemilihan Walikota Malang merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti.

Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat sosial ekonomi orangtua di 5 Kecamatan Kota Malang, bagaimana bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013 dan bagaimana hubungan antara tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013. Hasil olah data berupa tabel frekuensi menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi orangtua termasuk cukup tinggi dengan tingkat pendidikan mayoritas responden menjawab lulusan SMA/SMK, sebanyak 125 responden (46,29%). Dan tingkat pendapatan mayoritas responden menjawab > Rp. 3.000.000,-, sebanyak 100 responden (37.03%).

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan bentuk partisipasi pemilih pemula dapat dikatakan cukup baik dan aktif dalam mengikuti rangkaian partisipasi politik dalam Pilwali Kota Malang

tahun 2013 yakni mayoritas responden sebanyak 209 responden (77,40%) menggunakan hak suara/mencoblos dalam Pilwali Kota Malang tahun 2013.

Berdasarkan hipotesa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat pengaruh/hubungan positif antara tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali Kota Malang tahun 2013. Hasil analisis korelasi berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pemilih pemula dalam Pilwali Kota Malang tahun 2013 yaitu sebesar 81,2%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang artinya jika tingkat pendidikan dan pendapatan orangtua tinggi, maka partisipasi pemilih pemula juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat pendidikan dan pendapatan orangtua rendah maka partisipasi pemilih pemula juga akan rendah.

Dari perhitungan tersebut juga diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,659 sehingga dapat dikatakan 65,9% partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi orangtua yang berupa variabel pendidikan dan pendapatan, sedangkan sisanya sebesar 34,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan tersebut maka peneliti menyarankan, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama yang memiliki status sosial yang tinggi agar tidak lupa menggunakan hak pilihnya. Orang tua pun juga dihimbau agar memberikan contoh yang baik dalam kegiatan berpolitik terhadap putra-putrinya. Karena secara pasif lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang.
2. Untuk meningkatkan orientasi politik pemilih pemula perlu dilakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui kegiatan formal, informal maupun non formal.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala daerah lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan, simulasi mencontreng, pengenalan profil kandidat terutama pada pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Almond, A dan James S. Coleman. 1970. *The Politics of The Developing Areas*. New Jersey: Princeton.
- Budiarjo, Miriam. (ed). 1984. "Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan" dalam *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BPS. *Publikasi BPS* (html). <http://malangkota.bps.go.id/?hal=publikasi>. Diakses pada 20 Juni 2014.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. Thousand Oaks California: SAGE publications.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Dani, Wahyu Rahma. 2010. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2012. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hakim, Lukman. 2000. *Politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Percetakan Abadi.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintah daerah*. Jakarta: Perpustakaan BAPPENAS.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta Utara: CV.Rajawali.
- Hidayat, Aris Nova. 2013. *Hasil Pilkada Kota Malang Dibawa ke MK* (html). <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/058484769/Hasil-Pilkada-Kota-Malang-Dibawa-ke-MK>. Diakses pada 19 Mei 2014.
- Hutington, Samuel P. dan Juan M. Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isaak, Alan C. 1988. *Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*. Harcourt College Pub.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlini, Tarigan. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*. Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Mas'ood Mochtar dan Colin Mac Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasution, AA. 2000. *Indonesia Dicengkeram Subversi?*. Bandung: Nasution.
- Noer, Deliar. 1982. *Pemikiran Politik Di Negara Barat*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009*. (pdf). (<http://www.kpu.go.id>), diakses pada 27 Desember 2013.
- Pierce, John C. dan John L. Sullivan. 1980. *The Electorate Reconsidered*. California: SAGE Publications.

- Purba, Omta. 2013. *Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Raharjo, Puji. 2009. *Sosiologi 2: untuk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rojak, Jeje Abdul. 1999. *Politik Kenegaraan (Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Rozuli, Ahmad Imron. 2010. *Demokrasi, Pembangunan, dan Pemilukada; Teori, Konsep dan Implementasi*. Malang: Diaspora Publisher.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Setiajid. 2011. "Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang)", *Integralistik*, vol.22(1), p. 27
- Singarimun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sinyo. 2008. *Peni - Bambang DH Resmi Menang Versi Perhitungan Manual* (html). <http://malangraya.web.id/2008/07/26/peni-bambang-dh-resmi-menang-versi-perhitungan-manual/>. Diakses pada 18 Mei 2014.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarelawati, Endang. 2012. *DPT Pilkada Kota Malang 700 Ribu Jiwa* (html). <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/97568/dpt-pilkada-kota-malang-700-ribu-jiwa>. Diakses pada 19 Mei 2014.
- Sulistyo dan Basuki. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yogyakarta: Gradien Mediatama.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yogyakarta: Pustaka Timur.

Utomo, Tri Widodo. *Trend Desentralisasi dalam Administrasi* (html). <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/09/trend-desentralisasi-dalam-administrasi.html>. Diakses pada 25 Mei 2014.

